

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus di Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Akuntansi



Oleh :

Septi Sitanggang

NIM: 102114091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2014**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus di Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Akuntansi



Oleh :

Septri Sitanggang

NIM: 102114091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2014**

Skripsi

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus di Kabupaten Sleman**

Oleh:
Septri Sitanggang
NIM: 102114091

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing



M. Trisnawati R, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.

Tanggal: 10 Juni 2014

Skripsi

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus di Kabupaten Sleman**

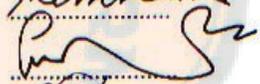
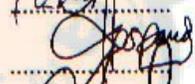
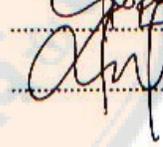
Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Septri Sitanggung

NIM:102114091

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Juli 2014
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Angraini, M.Si., Ak., C.A.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	M. Trisnawati R, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., C.A.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 31 Juli 2014
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan

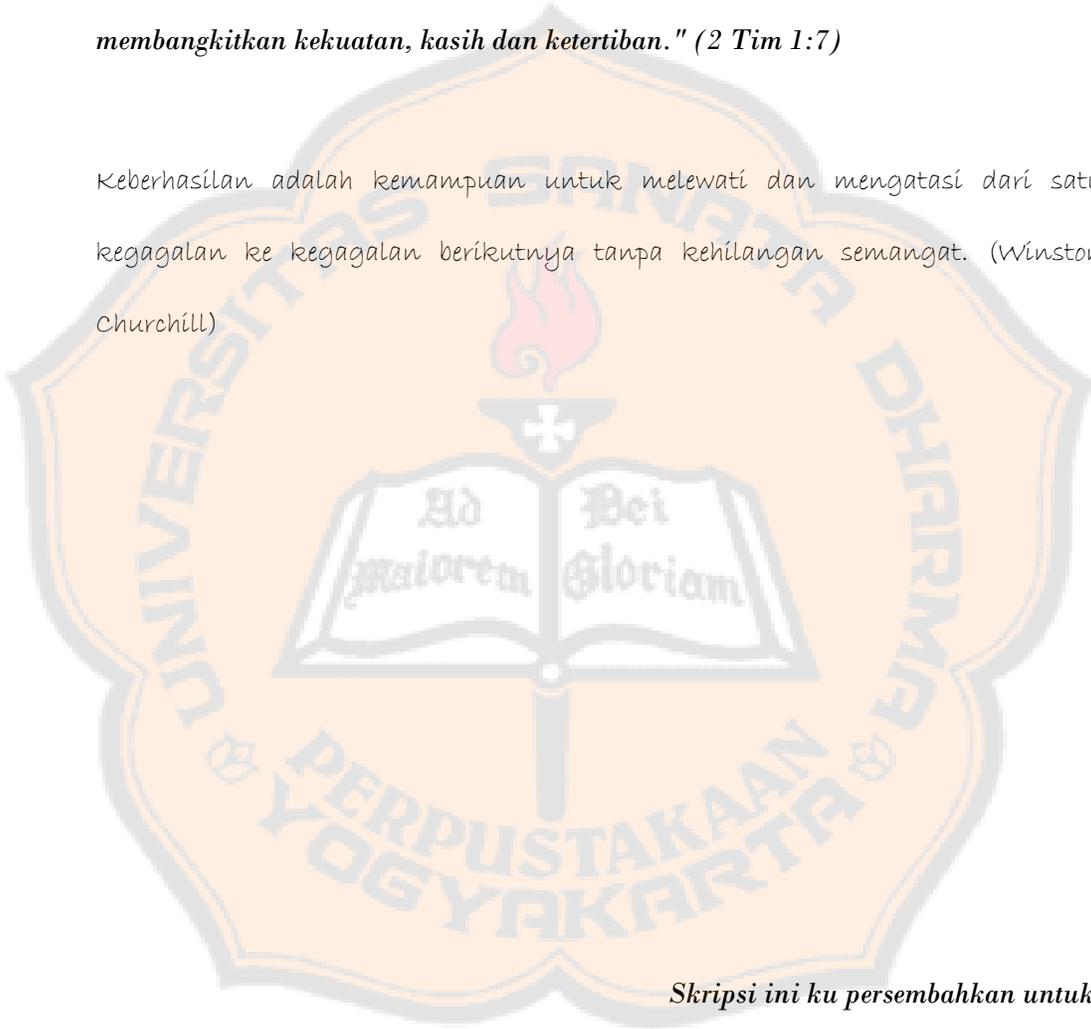


Dr. H. Herry Maridjo, M.Si

Motto dan Persembahan

..Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." (2 Tim 1:7)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churchill)



Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Tuhan Yesus

Bapakku J.Sitanggang dan Ibuku Sri Rahayu

Kakakku Goretty, dan Abangku Hotma

Sahabatku Nopi dan Lea

Teman-temanku

Serta orang-orang yang mendukung proses Penyelesaian Skripsiku



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 16 Juli 2014 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin dan meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2014
Yang membuat pernyataan,

Septri Sitanggang

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Septri Sitanggang

NIM : 102114091

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

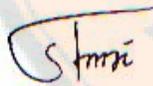
PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Sleman) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 31 Juli 2014

Yang Menyatakan,



Septri Sitanggang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

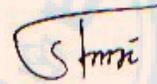
1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. M. Trisnawati Rahayu S.E., M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing selama proses pembelajaran di Universitas Sanata Dharma.
4. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu.
5. Harda Kiswaya, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
6. Deni Ria Setiawati, S.E., M.M. selaku Kepala bagian Pengembangan dan Pengendalian, dan karyawan DISPENDA serta DPKAD yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini.
7. Orang tua penulis, Bapak J. Sitanggang dan Mama Sri Rahayu, yang selalu memberi dukungan apapun salah satunya dari doa kalian.
8. Kakakku, Goretty dan Hotma yang terus memberikan semangat yang berkobar-kobar.
9. Sahabatku Meila, Nopi, Lea, Iren dan Tina selalu memberikan semangat, masukan dan penghiburan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Kak Hans dan Kak Elida yang selama ini memberikan masukan dalam penulisan ini.
11. Keluarga kosan Papi, Om Riwi, Daddy, Bu Endang, Bu Titik, Bu Iin, Mas Andre, Abdi, Ayu, Ocha, Sandra, dan Si kecil Kristy yang memberikan kegembiraan dan semangat.
12. Teman-teman MPT, Akuntansi angkatan 2010 khususnya kelas C, dan PSFE yang telah memberikan semangat dan masukan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 Juni 2014



Septri Sitanggang

DAFTAR ISI

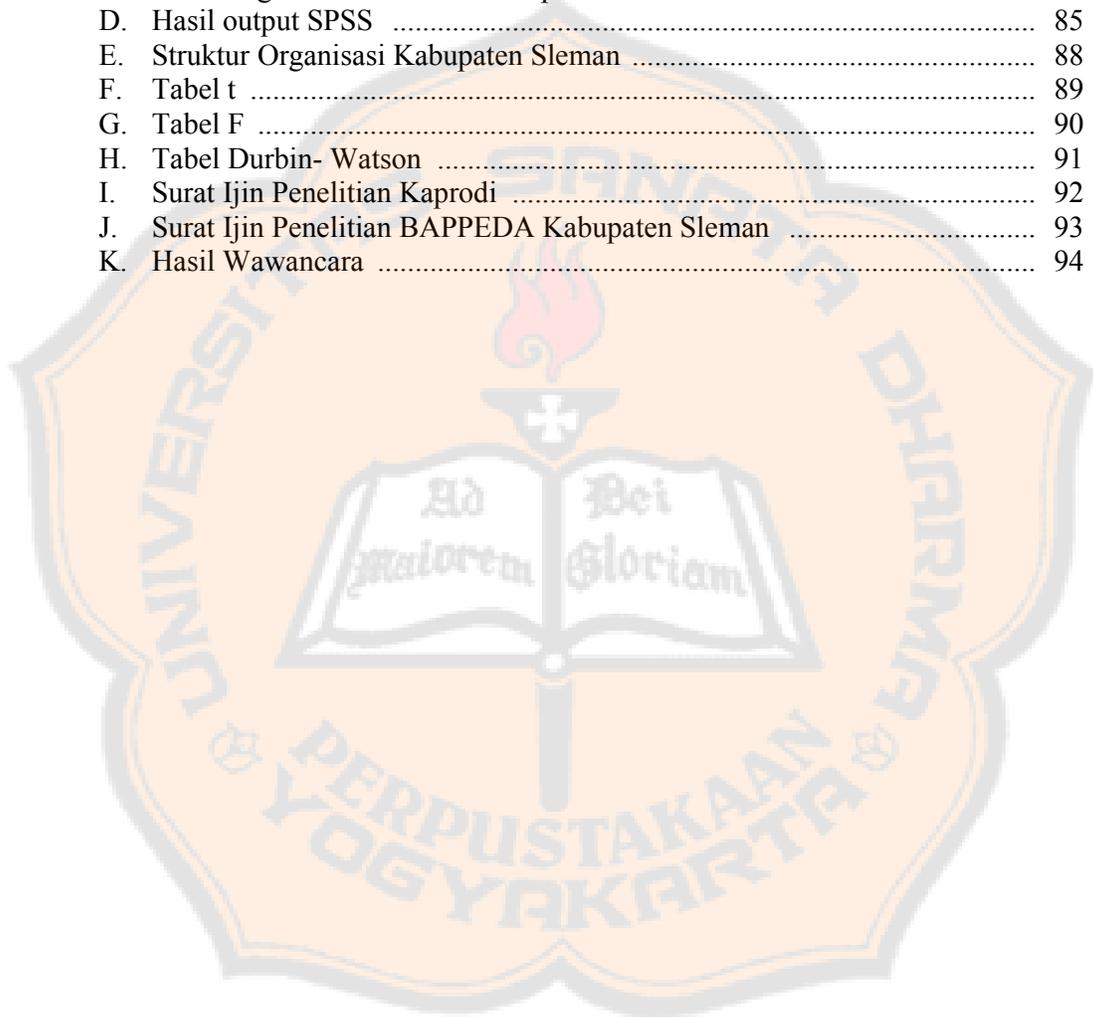
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Penelitian	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pendapatan Asli Daerah	7
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	7
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	7
B. Dana Perimbangan	7
C. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Pengelompokan Pajak	9
3. Fungsi Pajak	10
4. Syarat Pemungutan Pajak	12
5. Teori Pendukung Pemungutan Pajak	13
6. Hukum Pajak	14
7. Stelsel	15
8. Asas Pemungutan Pajak	16
9. Sistem Pemungutan Pajak	17
10. Hambatan Pemungutan Pajak	18
11. Tarif Pajak	19
12. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	20
D. Pajak Reklame	22
1. Pengertian Pajak Reklame	22
2. Dasar Hukum Pajak Reklame	22
3. Objek Pajak Reklame	23
4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame	24
5. Tarif Pajak Reklame	25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Masa Pajak dan Pajak Terutang Pajak Reklame	25
7. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Reklame...	25
E. Pajak Hiburan	26
1. Pengertian Pajak Hiburan	26
2. Dasar Hukum Pajak Hiburan	26
3. Objek Pajak Hiburan	26
4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	27
5. Tarif Pajak Hiburan	27
6. Masa Pajak dan Pajak Terutang Pajak Hiburan	28
7. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Hiburan ...	28
F. Kajian Peneliti Terdahulu	29
G. Perumusan Hipotesa	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan waktu Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Variabel Penelitian	33
F. Populasi dan Sampel Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM	43
A. Sejarah tentang Kabupaten Sleman	43
B. Geografi	45
1. Letak Wilayah	45
2. Luas Wilayah	45
3. Karakteristik Wilayah	45
C. Kekayaan Alam	48
D. Nilai-nilai Kebudayaan	49
E. Ekonomi	50
F. Organisasi dan Administrasi	52
G. Pendapatan Asli Daerah	53
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Data	55
B. Analisis data	58
C. Pembahasan	69
BAB VI PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

A. Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2000-2012	82
B. Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2000- 2012	83
C. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2000- 2012	84
D. Hasil output SPSS	85
E. Struktur Organisasi Kabupaten Sleman	88
F. Tabel t	89
G. Tabel F	90
H. Tabel Durbin- Watson	91
I. Surat Ijin Penelitian Kaprodi	92
J. Surat Ijin Penelitian BAPPEDA Kabupaten Sleman	93
K. Hasil Wawancara	94

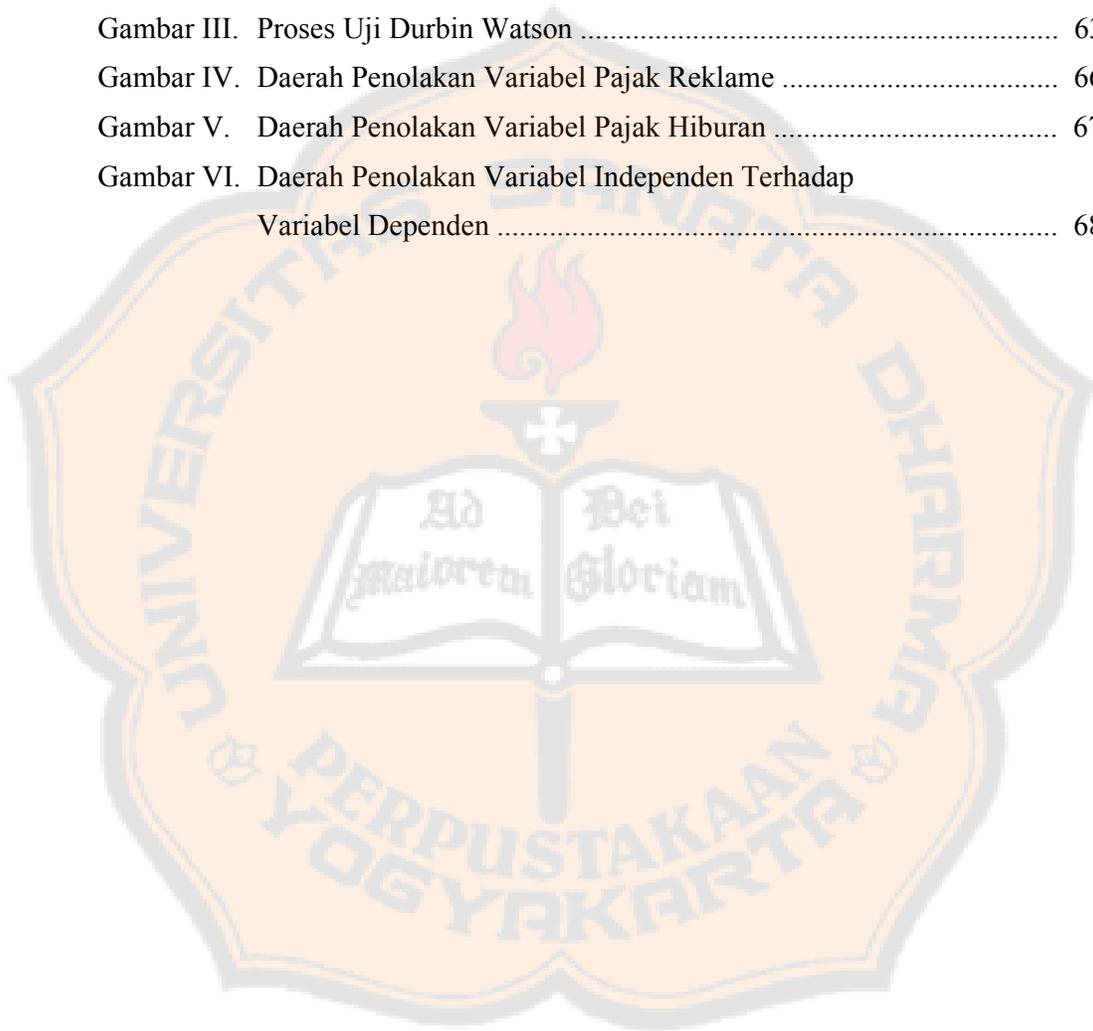


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prosentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000- 2012	56
Tabel 2. Prosentase Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000- 2012	57
Tabel 3. Prosentase Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000- 2012	58
Tabel 4. Uji Normalitas Data Dengan Kolmogorov Tets.....	59
Tabel 5. Tabel Coefficients (Multikolinearitas)	60
Tabel 6. Model Summary (Durbin-Watson)	63
Tabel 7. Tabel Rangkuman Pengujian	63
Tabel 8. Tabel Coefficients (Regresi Berganda)	64
Tabel 9. Model Summary (R Square)	65
Tabel 10. ANOVA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Proses Uji Durbin Watson	37
Gambar II. Scatterplot	61
Gambar III. Proses Uji Durbin Watson	63
Gambar IV. Daerah Penolakan Variabel Pajak Reklame	66
Gambar V. Daerah Penolakan Variabel Pajak Hiburan	67
Gambar VI. Daerah Penolakan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	68



ABSTRAK

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus di Kabupaten Sleman**

Septri Sitanggang
NIM: 102114091
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis uji-t dan uji-F dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, (2) tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dan (3) pengujian secara bersama-sama pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF ENTERTAINMENT TAX AND ADVERTISING TAX
ON REGIONAL ORIGINAL INCOME
Case Study at Sleman Regency**

Septri Sitanggang
NIM: 102114091
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2014

The research aimed to find out the influence of advertisement tax and entertainment tax on the regional original income in the period of 2000 until 2012.

The research was carried out in the office of regional income of Sleman Regency. The type of the research was case study, with interview and documentation as the data collecting techniques. The data analysis technique applied was multiple regression analysis using the analysis tools of t-test and F-test at 5% significance level.

The result of research showed that: (1) there was a significant influence of advertisement tax on regional income, (2) there was no significant influence of entertainment tax on regional income, and (3) the simultaneous test showed that advertisement tax and entertainment tax had a significant influence on the regional original income.

Keyword: advertisement tax, entertainment tax, regional original income

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah lama merencanakan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral.

Pajak daerah merupakan pendapatan yang sangat penting atau sangat kuat yang diperoleh daerah. Pajak daerah tahun 2012 sebesar 59,07% dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. pendapatan asli daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Selain itu, sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 6,38% dari pajak daerah dan pajak hiburan sebesar 2,13% dari pajak daerah. Ini membuktikan bahwa pajak reklame dan pajak hiburan memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah. Pajak reklame dan pajak hiburan dapat dilakukan pemungutannya secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat berperan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah walaupun memiliki persentase yang kecil terhadap pajak daerah.

Kabupaten Sleman merupakan daerah wisata yang terkenal di Indonesia. Banyak wisata lokal dan wisata asing yang datang untuk berlibur ke Kabupaten Sleman. Selain dari daerah wisata alam Kabupaten Sleman memiliki tempat hiburan yang lain seperti karaoke, club, pertunjukan seni budaya dan lain-lain. Selain dari hiburannya, Kabupaten Sleman juga banyak memasang reklame atau baliho-baliho pertunjukan dan pendidikan, selain itu juga ada baliho untuk partai politik untuk kampanye serta perusahaan/instansi banyak menggunakan reklame untuk pemasaran/promo. Namun ada sisi negatif dari pemasangan baliho-baliho di sepanjang jalan yaitu lingkungan sekitar menjadi kotor, kumuh dan tidak enak dipandang. Salah satu upaya agar tidak nampak kotor pemerintah daerah akan segera memasang iklan menggunakan videotron di titik-titik jalan tertentu.

Kabupaten Sleman akan menjadi pusat pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perkembangan tersebut, para pengunjung tertarik untuk berkunjung kembali. Semakin banyak usaha-usaha atau perindustrian yang ada di Kabupaten Sleman secara tidak langsung hal ini

berakibat pada penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan, karena dengan semakin banyaknya tempat wisata/hiburan dan jumlah usaha kerajinan tangan, maka semakin banyak juga konsumen yang menggunakan jasa reklame dan tempat hiburan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Apakah ada pengaruh antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012?

C. Batasan Masalah

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah itu sendiri dibagilagi menjadi dua yaitu pajak tingkat propinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Ada beberapa macam komponen pajak yang menjadi hak pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota yang menjadi hak pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, dan pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah. Karena keterbatasan waktu makadalam penelitian ini hanya pada pajak reklame dan pajak hiburan sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2000 sampai dengan 2012.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak reklame dan pajak hiburan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah, dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran teoritis dan praktis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

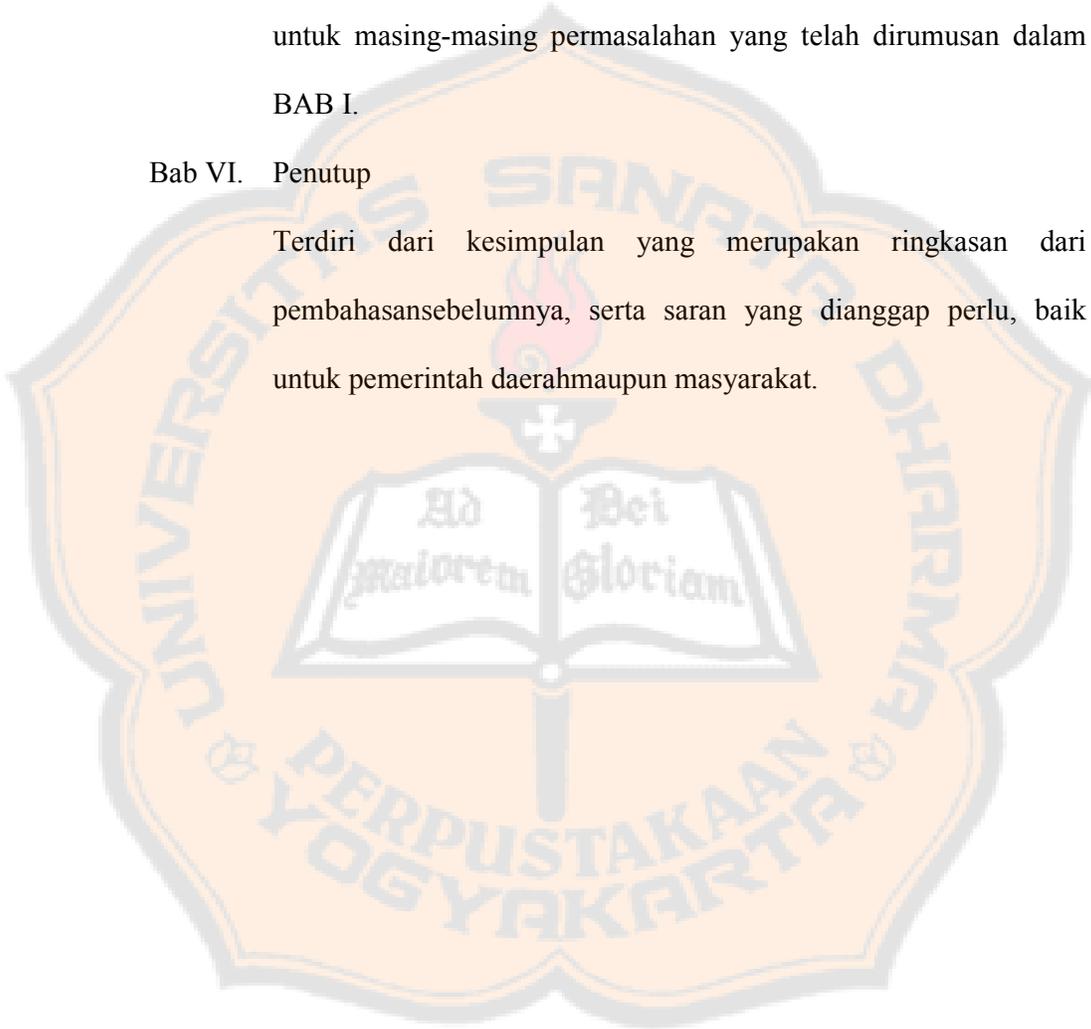
Pada bab ini akan menjelaskan gambaran umum Kabupaten Sleman yaitu mengenai sejarah pembentukan, keadaan geografis, kekayaan alam, keadaan sosial-budaya, ekonomi, politik, dan Pendapatan Asli Daerah

Bab V. Analisis data dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdiri dari deskripsi data, analisis data dan pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang telah dirumuskan dalam BAB I.

Bab VI. Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasanebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerahmaupun masyarakat.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

- a. Hasil Pajak Daerah,
- b. Hasil Retribusi Daerah,
- c. Bagian laba dari perusahaan milik daerah,
- d. Penerimaan dari dinas-dinas,
- e. Penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis sumber dana dan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu:

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan dari Sumber Daya Alam,

2. Dana Alokasi Umum,
3. Dana Alokasi Khusus.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2013:1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pengelompokan Pajak

Berikut ini beberapa pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2013:5-6):

a. Menurut golongannya

- 1) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.

3. Fungsi Pajak

The four R adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara, yaitu (Purwono,2010:8-10):

a. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi *Budgetair* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

b. *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan separatis di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang didambakan akan dapat tercapai.

c. *Repricing* (Pengaturan harga)

Fungsi ini sama penegertiiaan dengan fungsi *Regulerent* (mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Contoh dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah, termasuk yang dikenakan pada komoditas minuman kertas dengan tujuan mengurangi konsumsi masyarakat atas minuman kertas.

d. *Representation* (legalitas pemerintahan)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “No taxation without representation”, dan di Amerika Serikat yang berbunyi “Taxation without representation is robbery” mengimplikasikan bahwa pemerintah membenani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh

penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak langsung (seperti Pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dari perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Purwono,2010:14):

a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

c. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

5. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah (Mardiasmo,2013:3-4):

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk tunjangan negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

6. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni (Mardiasmo, 2013:5):

- a. *Hukum pajak materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikeanai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan haupusnya

utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo, 2013:6-7):

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (peghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve selsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

8. Asas Pemungutan Pajak

Beberapa asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2013:7):

a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak,

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

9. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan memiliki beberapa sistem pemungutan (Mardiasmo,2013:7-8):

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

10. Hambatan pemungutan pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi

(Mardiasmo, 2013:8-9):

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem Perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3) Sistem Kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

11. Tarif pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo,2013:9-10):

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif yang berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap. Contoh: besarnya tarif bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentase kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- 3) Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif regresif

Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

12. Timbul dan Hapusnya utang pajak

Hukum pajak mengenal dua ajaran tentang timbulnya utang pajak, yaitu (Purwono,2010:16):

a. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, tanpa diperlakukan suatu perbuatan manusia tetapi didasarkan atas suatu keadaan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak.

b. Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena diterbitkannya surat ketetapan pajak tanpa didasarkan pada suatu keadaan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak.

Sedangkan, hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a. *Pembayaran*, utang pajak hapus setelah pajak penanggung pajak melunasinya melalui pembayaran ke kas negara.
- b. *Kompensasi*, utang pajak hapus karena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak periode sebelumnya atau kelebihan pembayaran pajak yang lain.
- c. *Daluwarsa*, utang pajak hapus karena berakhirnya masa penagihan yang dimiliki oleh fiskus (diatur dalam pasal 22 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- d. *Penghapusan*, utang pajak hapus apabila secara administrasi utang tersebut tidak dapat lagi ditagih dikarenakan penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak memiliki warisan maupun ahli waris yang menggantikan, alamat penanggung pajak tidak diketemukan lagi, dan/atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang.

D. Pajak Reklame

1. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- d) Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame.

Pembaharuan undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak peklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- a) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/*slide*; dan
- j) Reklame peragaan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan

- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame (NSR) adalah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Sementara itu, jika reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- a) Jenis reklame;
- b) Bahan yang digunakan;
- c) Lokasi penempatan;
- d) Jangka waktu penyelenggaraan;
- e) Jumlah media reklame; dan
- f) Ukuran media reklame.

Jika nilai sewa reklame (NSR) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor di atas.

Nilai sewa reklame dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai sewa reklame = koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame.

5. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Adapun besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

6. Masa Pajak Dan Pajak Terutang Pajak Reklame

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

7. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.4 tahun 2011 Pasal 23 mengenai Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Reklame sebagai berikut:

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pajak hiburan adalah undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

3. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a) Tontonan film;
- b) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d) Pameran;
- e) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f) Sirkus, akrobat dan sulap;
- g) Permainan bilyar dan boling;
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j) Pertandingan olahraga.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).

4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

5. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b) Pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar 15% (lima belas persen);
- c) Kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- d) Pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e) Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f) Diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar 45% (empat puluh lima persen);

- g) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h) Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluhpersen);
- j) Refleksi, panti pijat, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10%(sepuluh persen); dan
- k) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Masa Pajak Dan Pajak Terutang Pajak Hiburan

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan dan/atau pengusaha hiburan.

7. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.3 tahun 2011 Pasal 22 mengenai Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Reklame sebagai berikut:

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

F. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian Pertama Mawar Dwi Putratanty, (2008) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel yang digunakan adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak restoran dengan hasil penelitian yaitu pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Kedua Faizah Wachdin, (2010) dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari laporan realisasi pendapatan asli daerah, pajak reklame dan pajak hiburan. Dengan hasil penelitiannya pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya, sedangkan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

G. Perumusan Hipotesa

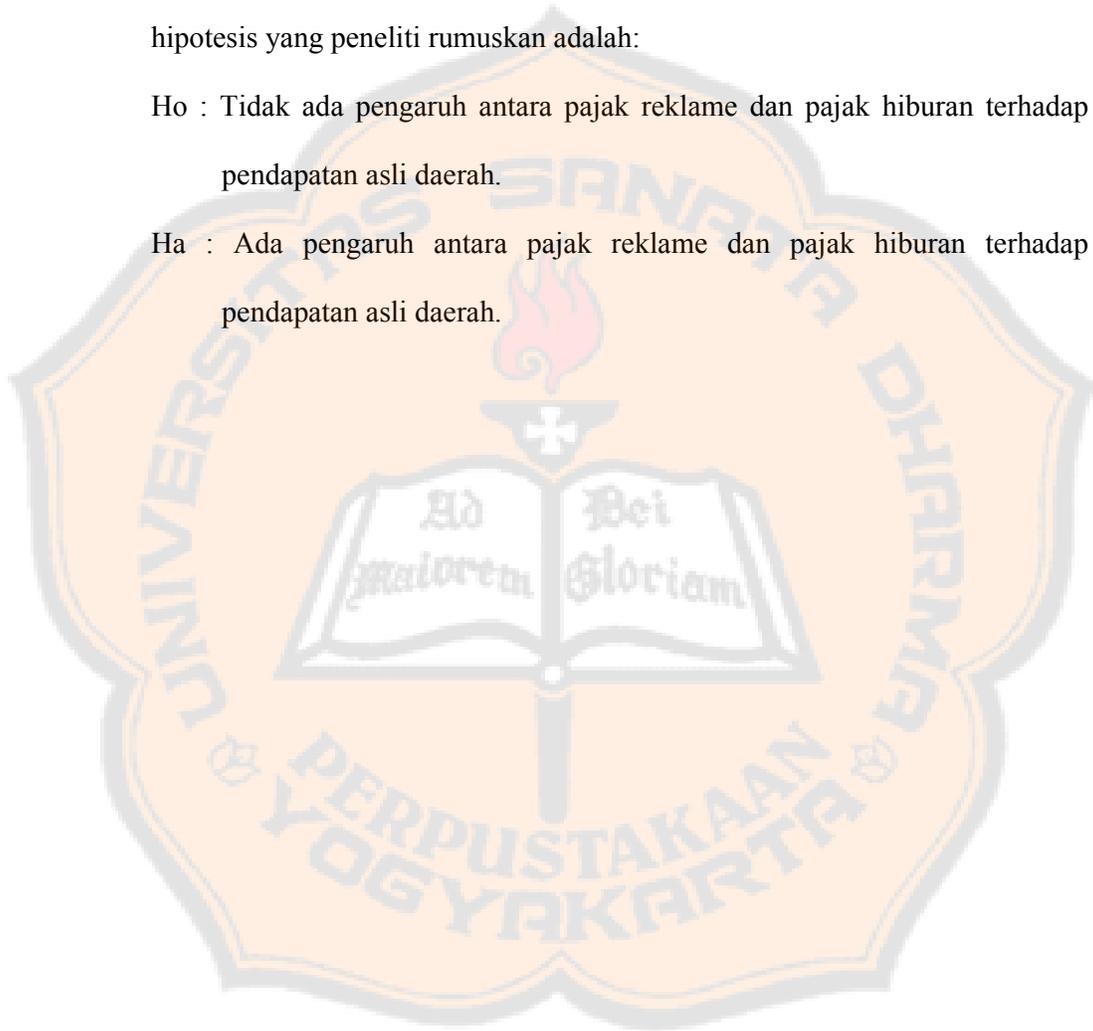
Pajak reklame dan pajak hiburan merupakan dua komponen pendapatan asli daerah. Pajak reklame dan pajak hiburan tentunya memberikan pengaruh yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Bentuk dari pengaruh tersebut adalah jika pajak reklame dan pajak hiburan meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah

dan sebaliknya jika pajak reklame dan pajak hiburan turun maka akan menyebabkan penurunan pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas yang telah diuraikan tersebut maka hipotesis yang peneliti rumuskan adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Ha : Ada pengaruh antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan (Sugiyono, 2010:13).

Jenis penelitian ini termasuk jenis studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan hanya berlaku pada objek tertentu (Adi, 2012:26).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.
2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Febuari 2014.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian.

Subjek Penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek pajak penelitian tersebut (Adi, 2012:6). Dalam hal ini subjek penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

2. Objek Penelitian.

Menurut Arikunto (2002: 96) menjelaskan bahwa variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian peneliti. Objek penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak hiburan serta pendapatan asli daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang laporan-laporan penelitian dan instansi tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang dibutuhkan adalah:

1. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.
2. Realisasi pajak reklame dan pajak hiburan Kabupaten Sleman dari tahun 2000 sampai tahun 2012.
3. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

E. Variabel Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan dalam penelitian ini maka dapat diidentifikasi variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel *Dependent* atau Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2008:4), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Variabel *Independent* atau Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2008:4), variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- a. Pajak reklame, meliputi total penerimaan dari reklame papan, billboard/videotron/megatron, reklame berjalan, reklame kain, reklame melekat/striker, dan reklame selebaran.
- a. Pajak hiburan, meliputi total penerimaan dari pameran, diskotik, karaoke, permainan bilyard, panti pijat/refleksi, pusat kebugaran dan pertandingan olah raga.

F. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua data pajak reklame, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak reklame, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah dari tahun 2000 sampai dengan 2012.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya-jawab langsung dengan subjek penelitian. Metode ini untuk memperoleh informasi mengenai data-data atau laporan realisasi yang berkenaan dengan penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan .

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik ini berguna untuk memperoleh data mengenai laporan realisasi pajak reklame, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah.

H. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Langkah- langkah yang dapat digunakan dalam penelitian adalah:

1. Memperoleh jumlah realisasi pajak reklame tahun 2000-2012

Data realisasi pajak reklame diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak reklame yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

2. Memperoleh jumlah realisasi pajak hiburan tahun 2000-2012

Data realisasi pajak hiburan diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hiburan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

3. Memperoleh jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2000-2012

Data realisasi pendapatan asli daerah diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

4. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk masing-masing variabel. Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bertujuan untuk membantu dalam menentukan distribusi normal dengan jumlah data penelitian yang sangat sedikit (kurang dari 30). Untuk uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, akan dilihat dari nilai probabilitasnya dalam output SPSS pada nilai

Asmp. Sig(2-tailed), jika probabilitasnya $> 0,05$ berarti data terdistribusi normal (Nugroho, 2005:112).

5. Uji Asumsi Klasik

Model penelitian yang digunakan untuk dapat melakukan estimasi, dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik yaitu:

a. Uji Multikolinearitas

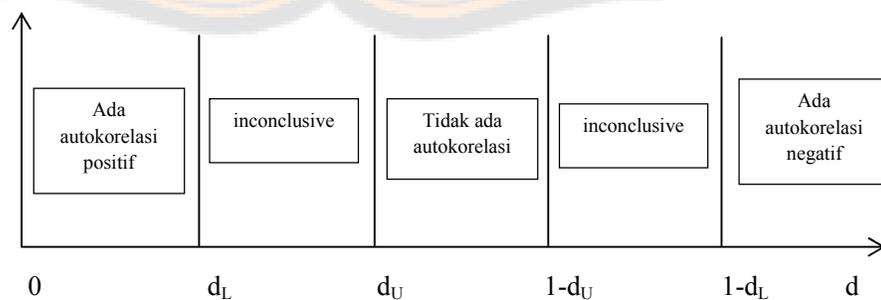
Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai *variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* pada output SPSS. Jika nilai *tolerance* $>10\%$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi serta jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang 0,70 (Nugroho, 2005:58).

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian eror(e_i)tidak konstan untuk beberapa nilai x . Pendektesian konstan tidaknya varian eror dapat dilakukan dengan menggambar grafik antara y dengan residu. Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian eror dikatakan konstan. (Sulistyo, 2012: 60)

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel penggang (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu peribde sebelumnya (e_{t-1}). Cara yang mudah untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakuakn dengan uji Durbin Watson. Model regresi linier berganda yang terbebas dari autokorelasi jika nilai durbin hitung terletak di daerah tidak ada autokorelasi. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel d_L dan d_U , dibantu dengan nilai $k=p-1$, untuk p adalah jumlah variabel independen (Nugroho, 2005:59).



Gambar I. Proses Uji Durbin Watson

6. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regresion Analysis*)

Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen (Nugroho, 2005: 43).

Suatu model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variabel yang dependen dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

a = Konstanta

X_1 = Variabel Bebas 1 (pajak reklame)

X_2 = Variabel Bebas 2 (pajak hiburan)

e = Error

b_1 = Koefisien Regresi Berganda yang mengukur besarnya perubahan variabel terikat Y atau Pendapatan Asli Daerah akibat perubahan variabel X_1 atau Pajak Reklame sebesar satu satuan dengan asumsi variabel bebas X_2 atau Pajak Hiburan tetap.

b_2 = Koefisien Regresi Berganda yang mengukur besarnya perubahan variabel terikat Y atau Pendapatan Asli Daerah akibat perubahan variabel X_2 atau Pajak Hiburan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel bebas X_1 atau Pajak Reklame tetap.

b. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi R^2 adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen (Nugroho, 2005: 50).

Dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{b_1(\sum x_1y) + b_2(\sum x_2y)}{\sum y^2}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

x_1 = Variabel pajak reklame

x_2 = Variabel pajak hiburan

b_1, b_2 = Koefisien regresi

y = Variabel PAD

Sifat dari koefisien determinasi ini adalah:

- 1) R^2 merupakan besarnya non negatif.
- 2) Batasannya adalah $0 < R^2 < 1$. suatu R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

c. Uji parsial dengan t-test

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan (Nugroho, 2005: 54).

Rumus:

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{se(\beta_1)} \sim t_{(n-k)}$$

Keterangan:

t = t hitung yang diperoleh

β_1 = Koefisien regresi

se = Standard error

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel bebas

Dari rumus tersebut akan dapat diperoleh hasil yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) t hitung > t tabel dengan taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ maka hipotesa H_0 ditolak dan H_a diterima.

- 2) $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dengan taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ maka hipotesa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Sedangkan untuk mendapatkan nilai t tabel dapat dilihat dalam Tabel Distribusi t dengan menentukan *degre of freedom* (df) : $n-k-1$ dan nilai α

d. Uji simultan dengan F-test

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpegaruh terhadap variabel dependen (Nugroho, 2005: 53).

Rumus:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F = F hitung yang diperoleh

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat bebas tertentu yaitu $n-k-1$ dengan taraf nyata atau signifikan $\alpha 5\%$.

- 1) $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti ada pengaruh yang tidak nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

7. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka hasil tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Penulis berharap hasil yang diperoleh diharapkan nantinya dapat memberikan pandangan dan saran bagi instansi atau perusahaan juga setiap orang yang berkepentingan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman Sulit untuk menemukan hari jadi Sleman. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Pada tahun 1964, KRT.Murdodiningrat memindahkan pusat pemerintahan ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Lokasinya menempati bangunan kantor Bappeda Sleman (sekarang). Pada masa ini pula Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman mulai memiliki lambang daerah.

Munculnya UU no. 18 tahun 1965 mengenai Hak Otonomi Daerah ditindaklanjuti DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan menerbitkan SK. no. 19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan DPRD Gotong Royong Tingkat II Sleman menjadi DPRD Gotong Royong

Kabupaten Sleman. Pada masa tersebut ketua DPRD Gotong Royong dijabat Soekirman Tirtoatmodjo.

Seiring berakhirnya masa keanggotaan DPRD Gotong Royong pada tahun 1971, jabatan ketua DPRD digantikan oleh Soelanto. Selanjutnya pada tahun 1974, UU no. 18 tahun 1965 digantikan UU no. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Berorientasi pada Undang-undang ini pemerintahan daerah Sleman menggunakan penyebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman.

Pada tahun 1974 KRT. Murdodiningrat digantikan oleh KRT. Tedjo Hadiningrat, yang hanya menjabat selama 3 bulan. Selanjutnya posisi bupati dijabat Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat, yang menjabat 2 periode (th. 1974-1985) dengan 2 kali penggantian ketua DPRD. Pada tahun 1977, posisi Soelanto sebagai ketua DPRD digantikan oleh R. Soelarjohingga tahun 1982, yang selanjutnya digantikan Samingan H.S.

Pada tahun 1985 kepemimpinan Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat digantikan Drs. Samirin, yang menjabat selama satu periode (1985-1990). Pada masa jabatannya, Drs. Samirin mengalami sekali pergantian ketua DPRD Sleman yakni pada tahun 1987, Samingan H.S. digantikan Letkol. Sudiyono, yang menjabat 2 periode masa jabatan (1987-1997).

B. Geografi

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km², Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

3. Karakteristik Wilayah

a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan

(ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

- 2) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
 - 3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - 4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan

wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu).

Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.

2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

3) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

C. Kekayaan Alam

Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sleman mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan tersebut antara lain:

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sleman adalah jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *tensina*, *grumosol*, *meditran*, dan *latosol*. tanah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan, pekarangan/pembangunan dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Kabupaten Sleman meliputi air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air Permukaan digunakan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan domestik. Sedangkan air tanah digunakan untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan, industri, dan sebagainya.

3. Flora dan Fauna

Ada beberapa jenis flora yang tumbuh di Kabupaten Sleman antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kelapa, salak pondok, dan sebagainya. Terdapat juga beberapa jenis Fauna yang hidup, antara lain jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan unggas. Ada jenis burung yang menjadi khas Kabupaten Sleman yaitu burung Punglor. Di wilayah Sleman, burung yang bersuara merdu ini berhabitat kebun Salak Pondoh. Dengan makanan utama cacing tanah dan kumbang (uret),

Punglor merupakan predator bagi hama tanaman Salak Pondoh. Sekalipun pada saat ini populasinya semakin langka, burung ini ditetapkan sebagai satwa identitas daerah Sleman sebagai kiat untuk membangun rasa memiliki warga masyarakat sehingga masyarakat akan ikut serta melestarikannya.

4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di wilayah Sleman umumnya termasuk bahan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, gips, tanah liat, pasir, batu beku andesit dan kerikil.

D. Nilai-nilai Kebudayaan

Sleman merupakan bagian dari Provinsi Yogyakarta. Dalam nilai budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman tidak jauh berbeda dengan Yogyakarta. Organisasi yang ada di Kabupaten Sleman sebanyak 887 kelompok terdiri dari kelompok tari 274 kelompok, musik 492 kelompok, kelompok sastra 11 kelompok, teater tradisional 45 kelompok, lawak 1 kelompok, wayang klitik 1 kelompok, wayang sembung 1 kelompok, dan drama tari 11 kelompok.

Peninggalan sejarah dan nilai tradisional berupa bangunan perjuangan 1 buah, bangunan candi/situs 68 buah, goa sejarah 4 buah, monumen 34 buah, peninggalan pesanggrahan 2 buah, dan upacara adat 11 jenis.

Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk 10 desa budaya yaitu Desa Bangunkerto, Banyurejo, Widodomartani,

Tirtoadi, Sidomoyo, Sidomulyo, Sinduharjo, Sambirejo, Argomulyo, Sendangmulyo. Selain itu ada 2 kawasan cagar budaya yaitu Desa Ambar Ketawang Kecamatan Gamping dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan. Pengembangan kebudayaan dilaksanakan dengan dasar nilai-nilai luhur budaya melalui peran aktif masyarakat.

E. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sleman menuju pada keseimbangan antara industri dan pertanian yang didukung dengan sektor lain. Sektor industri yang berada di daerah Sleman membantu untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Sektor-sektor yang ada yaitu:

1. Pertanian

Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Sleman didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya yaitu selain rumah tangga dan perusahaan pertanian berbadan hukum. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2013 tercatat sebanyak 110.402 rumah tangga, turun sebesar 23,70 persen dari tahun 2003 yang tercatat sebanyak 144.698 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tahun 2013 tercatat sebanyak 4 perusahaan dan pelaku usaha lainnya sebanyak 22 unit.

Secara kewilayahan, Kecamatan Tempel tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak pada tahun 2013, yaitu sebanyak 8.733 rumah tangga pertanian diikuti Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Turi masing-masing 8.499 dan 7.718 rumah tangga pertanian. Pada periode yang sama, Kecamatan Depok memiliki jumlah rumah tangga paling kecil yaitu 2.333 rumah tangga dan satu perusahaan berbadan hukum.

2. Industri

Di Kabupaten Sleman terdapat beberapa macam industri, yaitu:

- a. Industri tekstil pakaian dan kulit
- b. Industri makanan dan minuman
- c. Industri percetakan, kertas dan penerbitan
- d. Industri kayu dan barang-dari kayu
- e. Industri barang galain bukan logam
- f. Industri kimia dan barang-barang kimia

3. Pertambangan dan Bahan Galian

Komoditas utama bahan pertambangan dan galian adalah abu bumi, pasir kuarsa, kalasit, batu kapur, gips dan pasir kerikil.

4. Perhubungan

Sarana perhubungan yang digunakan untuk lintas kabupaten, antarkota, dan provinsi. Kabupaten Sleman memiliki sarana perhubungan darat dan udara. Untuk perhubungan udara Kabupaten memiliki Bandar Udara Adi Sucipto, sedangkan untuk darat yaitu kendaraan umum yang berada di

terminal Condong Catur untuk antar kabupaten dan terminal Jombor untuk antar kota dan provinsi.

5. Pariwisata

Objek wisata yang berada di Kabupaten Sleman tergolong banyak. Objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Candi Prambanan, Situs Ratu Boko, Objek Wisata Merapi, Cagar Alam Kaliurang dan lain-lain.

F. Organisasi dan Administrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman berikut struktur organisasi dan administrasinya:

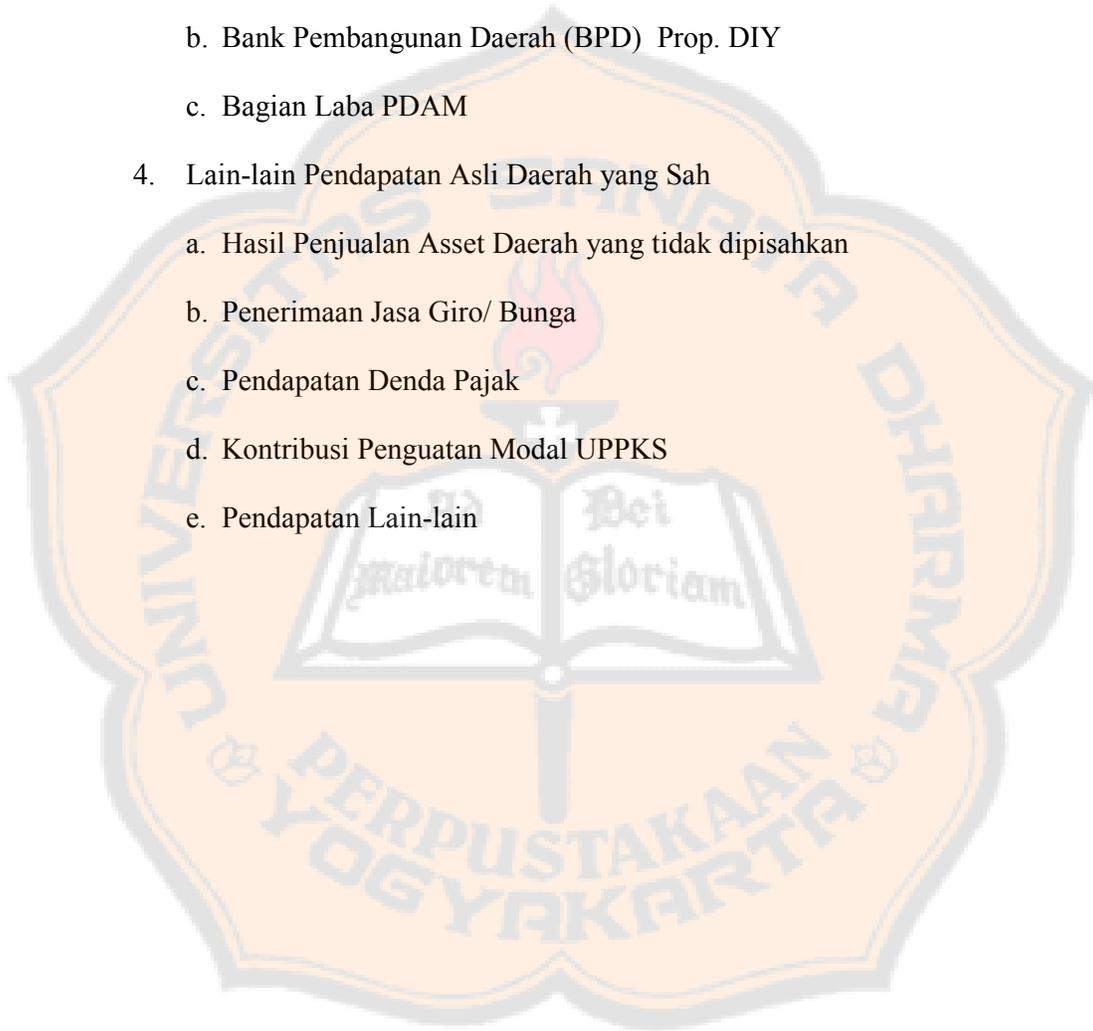
- a. Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Pemerintah Daerah terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati. Bupati yang sekarang adalah Drs. H. Sri Purnomo, M.Si sedangkan Wakil Bupati adalah Hj. Yuni Setia Rahayu M.Hum.
- c. Perangkat Daerah terdiri atas Sekertariat Daerah dan Staf Ahli.
- d. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam Menyusun kebijaksanaan serta membina kerja dengan dinas, badan-badan, dan unit pelaksana lainnya.
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

G. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman didapat dari beberapa Sumber, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan Umum
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam & Buatan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak BPHTB
2. Hasil Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi dan OR
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - d. Retribusi Pasar
 - e. Retribusi Ijin Trayek
 - f. Retribusi ijin gangguan
 - g. Retribusi penjualan Produksi Daerah
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil
 - i. Retribusi Lainnya

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD)
 - a. PD. BPR Bank Sleman
 - b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY
 - c. Bagian Laba PDAM
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a. Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Penerimaan Jasa Giro/ Bunga
 - c. Pendapatan Denda Pajak
 - d. Kontribusi Penguatan Modal UPPKS
 - e. Pendapatan Lain-lain



BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan data penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Data yang akan dianalisis adalah realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2012.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ini berlaku sebagai variabel dependen. Dalam analisis yang dilakukan akan dicari apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 13 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Prosentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran 2000-2012

Tahun	Target Pajak PAD	Realisasi Pajak PAD	%
2000	Rp 15.829.886.951,00	Rp 17.889.883.435,46	113,01
2001	Rp 26.616.137.717,36	Rp 29.571.153.214,43	111,10
2002	Rp 34.846.979.981,95	Rp 38.908.192.767,97	111,65
2003	Rp 43.494.246.800,00	Rp 52.978.731.465,50	121,81
2004	Rp 53.919.261.011,00	Rp 70.499.050.996,77	130,75
2005	Rp 39.624.263.453,00	Rp 46.759.870.041,06	118,01
2006	Rp 75.792.320.330,00	Rp 90.710.095.117,40	119,68
2007	Rp 94.896.446.720,00	Rp 120.656.548.721,00	127,15
2008	Rp 106.751.631.343,00	Rp 138.745.677.613,26	129,97
2009	Rp 128.918.153.263,99	Rp 157.604.530.382,84	122,25
2010	Rp 163.530.209.690,15	Rp 163.443.271.919,77	99,95
2011	Rp 203.766.407.218,00	Rp 227.108.171.114,47	111,46
2012	Rp 241.003.081.720,31	Rp 301.069.539.284,13	124,92
Jumlah	Rp 1.228.989.026.199,76	Rp 1.455.944.716.074,06	1541,71
Rata-rata			118,59

Sumber: DPKAD dan Dispenda Sleman

2. Pajak Reklame

Pajak Reklame berlaku sebagai variabel independen. Dalam analisis yang dilakukan akan dilihat apakah pajak reklame sebagai salah satu komponen dari pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 13 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut tersaji dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Prosentase Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2000-2012

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	%
2000	Rp 308.725.000,00	Rp 315.077.374,70	102,06
2001	Rp 536.866.478,76	Rp 577.864.878,95	107,64
2002	Rp 622.554.388,95	Rp 832.927.225,91	133,79
2003	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.614.415.775,55	134,53
2004	Rp 2.817.000.000,00	Rp 3.511.364.429,19	124,65
2005	Rp 3.600.000.000,00	Rp 4.180.130.371,96	116,11
2006	Rp 3.800.000.000,00	Rp 4.454.870.618,39	117,23
2007	Rp 4.500.000.000,00	Rp 4.749.917.481,91	105,55
2008	Rp 5.621.622.443,00	Rp 8.147.022.563,73	144,92
2009	Rp 6.800.000.000,00	Rp 9.010.860.114,49	132,51
2010	Rp 8.600.000.000,00	Rp 9.059.573.587,09	105,34
2011	Rp 8.750.000.000,00	Rp 9.322.567.271,01	106,54
2012	Rp 9.000.000.000,00	Rp 11.340.140.023,22	126,00
Jumlah	Rp 56.156.768.310,71	Rp 67.116.731.716,10	1556,90
Rata-rata			119,76

Sumber: DPKAD dan Dispenda Sleman

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berlaku sebagai variabel independen. Dalam analisis yang dilakukan akan dilihat apakah pajak hiburan sebagai salah satu komponen dari pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 13 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut tersaji dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Prosentase Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2000-2012

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	%
2000	Rp 200.000.000,00	Rp 334.162.268,55	167,08
2001	Rp 519.502.000,00	Rp 557.919.626,36	107,40
2002	Rp 526.700.000,00	Rp 658.988.493,25	125,12
2003	Rp 550.000.000,00	Rp 587.364.697,55	106,79
2004	Rp 600.000.000,00	Rp 887.618.389,17	147,94
2005	Rp 800.000.000,00	Rp 835.458.981,41	104,43
2006	Rp 900.000.000,00	Rp 959.443.926,28	106,60
2007	Rp 1.500.000.000,00	Rp 2.035.377.677,33	135,69
2008	Rp 2.300.000.000,00	Rp 3.553.667.031,10	154,51
2009	Rp 2.600.000.000,00	Rp 3.637.358.441,16	139,90
2010	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.793.513.241,41	108,39
2011	Rp 3.200.000.000,00	Rp 2.709.834.885,40	84,68
2012	Rp 2.600.000.000,00	Rp 3.804.493.161,56	146,33
Jumlah	Rp 19.796.202.000,00	Rp 24.355.200.820,53	1634,85
Rata-rata			125,76

Sumber: DPKAD dan Dispenda Sleman

B. Analisis Data

Penelitian yang digunakan untuk mencari suatu pengaruh adalah dengan analisis regresi berganda, peneliti membutuhkan tiga variabel yang akan digunakan diantaranya dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (dependen). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah pajak reklame dan pajak hiburan, dan sebagai variabel dependen adalah pendapatan asli daerah.

Data diatas diolah dengan menggunakan program SPSS. Sebelum dilakukan teknik analisis data dengan regresi maka dilakukan uji normalitas dan pengujian asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bertujuan untuk membantu dalam menentukan distribusi normal dengan jumlah data penelitian yang sangat sedikit (kurang dari 30). Untuk uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, akan dilihat dari nilai probabilitasnya dalam output SPSS pada nilai *Asmp. Sig(2-tailed)*, jika probabilitasnya > 0,05 berarti data terdistribusi normal (Nugroho, 2005:112).

Tabel 4. Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov Test

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		PAD	PAJAK REKLAME	PAJAK HIBURAN
N		13	13	13
Normal Parameters ^a	Mean	111995720467.2354	5162825516.5954	1873476986.1946
	Std. Deviation	84371505181.63344	3814299601.82939	1419785444.64938
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.150	.168	.279
	Positive	.150	.158	.279
	Negative	-.132	-.168	-.189
Kolmogorov-Smirnov Z		.541	.604	1.005
Asymp. Sig. (2-tailed)		.931	.858	.265

a. Test distribution is Normal.

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada variabel PAD sebesar 0,931; pajak reklame sebesar 0,858; dan pajak

hiburan sebesar 0,265 yang berarti nilai Sig. lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka PAD, pajak reklame, pajak restoran berdistribusi normal. Artinya data layak digunakan dalam penelitian dan dapat dilanjutkan.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen yang lain (Nugroho, 2005:58).

Tabel 5. Tabel Coefficients

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Reklame	.112	8.922
	Pajak Hiburan	.112	8.922

a. Dependent Variable: PAD

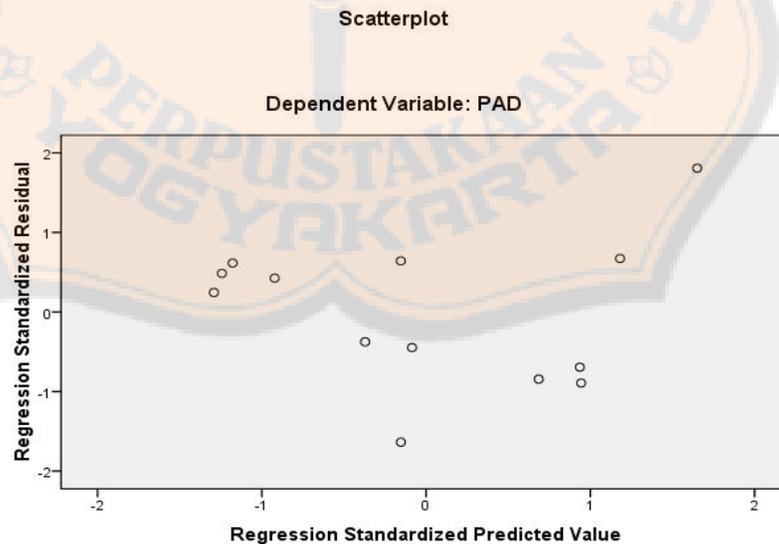
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 5 di dapat nilai tolerance dan VIF, dimana terlihat bahwa angka tolerance dan VIF pada variabel Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sebesar 0,112 dan 8,992. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan angka tolerance dan VIF model regresi untuk dua variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Artinya antara variabel Pajak Reklame dan Pajak Hiburan (variabel independen) tidak terjadi kemiripan yang mengakibatkan korelasi yang sangat kuat

antar keduanya. Sehingga terhindar dari pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi jika dalam regresi varian error (e_i) tidak konstan untuk beberapa nilai x . Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik antara y dengan residu. Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian error dikatakan konstan (Sulistyo, 2012: 60).



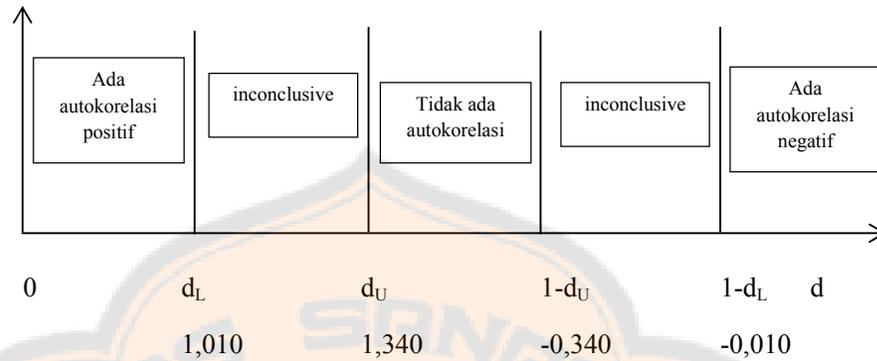
Gambar II. Scatterplot

Dari Gambar II. Scatterplot diatas tampak bahwa titik-titik penyebaran dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan nilai signifikansi 5%. Model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah tidak ada autokorelasi. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel d_L dan d_U , dibantu dengan nilai $k=p-1$, p yaitu jumlah variabel independen (Nugroho, 2005:59).

Hasil perhitungan uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 6 *Model Summary* (Durbin-Watson). Berdasarkan hasil regresi ganda diperoleh nilai statistik d sebesar 1,170. Adapun banyaknya data (n) =13, untuk 2 variabel bebas (p), $k = p - 1 = 2 - 1 = 1$, dan level of significant = 0,05, maka di dapat d_{tabel} dengan batas bawah (d_L) = 1,010 dan batas atas (d_U) = 1,340 (dapat dilihat pada tabel statistik Durbin-Watson, Lampiran). Sehingga nilai $1-d_U = 1 - 1,340 = -0,340$ dan nilai $1-d_L = 1 - 1,010 = -0,010$. Maka klasifikasi nilai statistik sebagai berikut:



Gambar III. Proses Uji Durbin Watson

Tabel 6. Model Summary (Durbin-Watson)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.877	.852	3.24547E10	1.035

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: output SPSS

Oleh karena nilai $d=1,035$ berada di daerah d_U (1,340) dan $1- d_U$ (-0,340), maka berarti tidak terjadi autokorelasi.

Dari uji normalitas dan ketiga uji asumsi klasik di atas maka dapat dibuat rangkuman sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Rangkuman Pengujian

Pengujian	Kesimpulan
Normalitas Data	Berdistribusi Normal
Multikolinieritas	Tidak terjadi
Heteroskedastisitas	Tidak terjadi
Autokorelasi	Tidak terjadi

Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang dihasilkan dengan bantuan SPSS.

1. Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regresion Analysis*)

Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen (Nugroho, 2005: 43).

Tabel 8. Tabel Coefficients

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6078739412.970	15599985154.653		.390	.705
Pajak Reklame	24.805	7.337	1.121	3.381	.007
Pajak Hiburan	-11.822	19.710	-.199	-.600	.562

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 8 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.078.739.412,970 + 24,805X_1 - 11,822X_2$$

2. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi adalah membandingkan nilai adjusted R square untuk pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (Nugroho, 2005: 50).

Tabel 9. Model Summary (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.877	.852	3.24547E10

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 di peroleh adjusted R square (adjusted R²) adalah 0,852 dan Nilai R sebesar 0,938. Nilai R sebesar 0,938 menyatakan bahwa Pajak Reklame dan Pajak hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi atau hubungan yang erat.

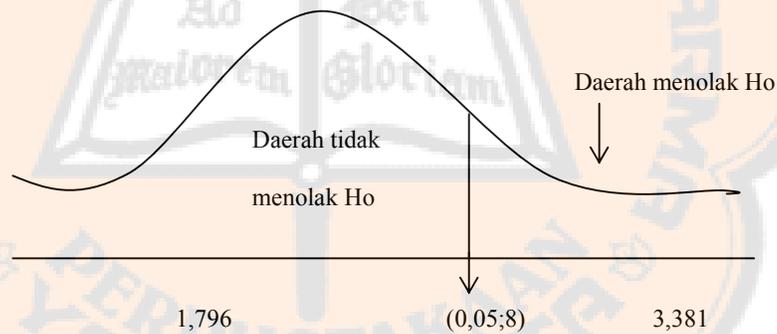
3. Uji parsial dengan t-test

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan masing-masing variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari hasil olah komputer dengan bantuan SPSS diperoleh t_{hitung} untuk Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Berdasarkan tabel distribusi t, untuk nilai t_{tabel} adalah 1,796 (dari $n-k-1= 13-1-1=11$, signifikan 5%=0,05).

a. Pengujian terhadap pajak reklame (X_1)

Nilai yang digunakan dalam pengujian adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Oleh karena nilai t_{hitung} sebesar 3,381 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,796 maka dengan demikian H_0 ditolak dan dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan dari pajak reklame periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 (Tabel 8).

Penentuan kriteria pengujian satu sisi kanan.

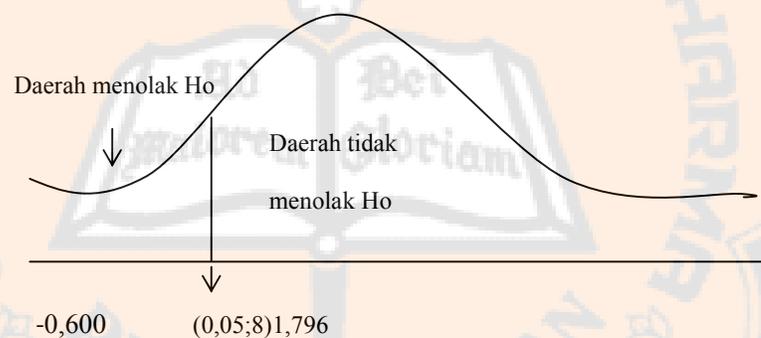


Gambar IV. Daerah penolakan variabel pajak reklame

b. Pengujian terhadap pajak hiburan (X_2)

Nilai yang digunakan dalam pengujian adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Oleh karena nilai t_{hitung} sebesar $-0,600$ lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $1,796$ maka dengan demikian H_0 : diterima dan dapat diartikan tidak ada pengaruh yang signifikan dari pajak hiburan periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 (Tabel 8).

Penentuan kriteria pengujian satu sisi kiri.



Gambar V. Daerah penolakan variabel Pajak Hiburan

4. Uji Simultan dengan F-test

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat kesalahan $0,05$.

Tabel 10. ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.489E22	2	3.744E22	35.550	.000 ^a
	Residual	1.053E22	10	1.053E21		
	Total	8.542E22	12			

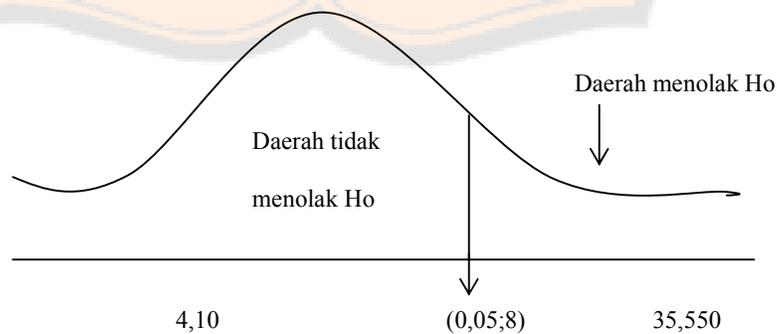
a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Outout SPSS

Diperoleh nilai F_{tabel} adalah 4,10 (0,05; 11). Nilai yang digunakan dalam pengujian adalah membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} dari tabel 10. Dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 35,550 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 4,10, dengan demikian H_0 : ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel independen (Pajak Reklame dan Pajak Hiburan) secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Penentuan kriterian pengujian satu sisi kanan.



Gambar VI. Daerah Penolakan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

C. Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian.

1. Analisis regresi berganda

Berikut ini hasil persamaan regresi berganda:

$$Y = 6.078.739.412,970 + 24,805X_1 - 11,822X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan bahwa:

- a. Nilai 6.078.739.412,970 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada Pendapatan dari Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, maka Pendapatan Asli Daerah Sleman adalah 6.078.739.412,970.
- b. Nilai 24,805 merupakan koefisien regresi X_1 yang menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan sebesar Rp1,00 untuk Pajak Reklame, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sleman sebesar Rp 24,805 dan sebaliknya, jika Pajak Reklame menurun sebesar Rp1,00, maka Pendapatan Asli Daerah Sleman juga diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp 24,805 dengan anggapan X_2 tetap.
- c. Nilai 11,822 merupakan koefisien regresi X_2 yang menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1,00 untuk pajak hiburan, maka akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah Sleman sebesar Rp 11,822 dan sebaliknya jika Pajak Hiburan menurun sebesar Rp1,00, maka Pendapatan Asli Daerah Sleman diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 11,822 dengan anggapan X_1 tetap.

Hal ini dikarenakan sumber Pendapatan Asli Daerah masih di dominasi oleh Pajak Daerah yang setiap tahunnya penerimaannya mengalami Peningkatan. Bahkan realisasinya selalu melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pajak daerah memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengujian terhadap variabel Pajak Reklame (X_1)

Berdasarkan hasil olahan SPSS, nilai R (*Adjusted R Square*) diperoleh 86,1% artinya bahwa pendapatan asli daerah dijelaskan oleh variabel independen (pajak reklame) sebesar 86,1%, sedangkan 13,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain pajak reklame yang tidak termasuk dalam model penelitian. Sehingga dapat diartikan bahwa jika pajak reklame naik maka akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Keputusan dapat diambil dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,007 atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan, yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari pajak reklame periode tahun 2000 sampai dengan 2012 terhadap pendapatan asli daerah periode 2000 sampai dengan 2012.

Dari tahun ke tahun penerimaan pajak reklame terus meningkat dari tahun 2000-2012 diperoleh sebesar Rp 67.125.731.715,74. Selain itu wajib pajak pada Pajak Reklame terus bertambah maka Penerimaan Pajak Reklame juga ikut meningkat karena banyak perusahaan atau instansi yang baru dan mempromosikan produknya melalui reklame. Sehingga Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Hasil Wawancara Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak reklame ini sudah ada tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2011 yaitu:

- a) Jenis reklame
- b) Harga bahan reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame
- c) Lokasi penempatan reklame ditetapkan berdasarkan kelas jalan
- d) Waktu dan jangka waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dalam satuan hari dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
- e) Jumlah reklame yang dipasang
- f) Ukuran media reklame ditetapkan dalam satuan meter persegi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki upaya agar pajak Reklame terus meningkat yaitu:

- a) Penataan dan pemantauan titik-titik reklame yang sesuai dengan titik-titik median
- b) Melakukan pemantauan apakah ada reklame liar di titik-titik median, jika ada ada reklame liar pemda akan menertibkan reklame liar.
- c) Melakukan pemantauan untuk masa tayang, jika masa tayang yang akan habis maka pemda akan memberi tahu lewat media telepon kepada wajib pajak bahwa masa tayang reklame akan habis. Jika lewat media telepon tidak ada tanggapan dari wajib pajak dan masa tayang sudah melebihi dari masa tayang maka pemda akan memberi tahu lewat surat teguran kepada wajib pajak.

3. Pengujian terhadap variabel Pajak Hiburan (X_2)

Berdasarkan hasil olahan SPSS, nilai R (*Adjusted R Square*) diperoleh 71,2% artinya bahwa pendapatan asli daerah dijelaskan oleh variabel independen (pajak hiburan) sebesar 71,2%, sedangkan 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain pajak hiburan yang tidak termasuk dalam model penelitian. Sehingga dapat diartikan bahwa jika pajak hiburan naik maka akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Keputusan dapat diambil dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,562 atau probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H_0

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari pajak reklame periode tahun 2000 sampai dengan 2012 terhadap pendapatan asli daerah periode 2000 samapi dengan 2012.

Hal ini di sebabkan oleh peraturan baru pada pajak hiburan terutama pada penyediaan Golf. Pada Tahun 2010 penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 3.793.513.241,41 sedangkan pada tahun 2011 pajak hiburan menjadi Rp 2.709.834.885,40 yang disebabkan oleh peraturan baru. Dalam Undang-undang yang baru golf dimasukkan dalam pendapatan daerah namun kenyataannya tidak dapat dipungut oleh daerah, karena pengusaha golf masih di kenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga pengusaha golf keberatan untuk membayar dua macam pajak. Pada akhirnya para pengusaha golf indonesia mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Kontitusi, dan hasilnya pengusaha golf hanya membayar PPN saja.

Selain dari golf pajak hiburan bisa tidak berpengaruh karena objek pajak hiburan ada yang bersifat eksidental. Maksud dari eksidental dimana pajak hiburan yang pemungutannya tidak direncanakan ketika ada pertunjukan/event diluar dari yang direncana. Ketika tidak ada event maka penerimaan pajak hiburan akan mengalami penurunan terhadap pendapatan asli daerah sleman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kendala dalam pemungutan Pajak Hiburan Ketika ada konser musik pada saat korporasi tiket harus menyerahkan uang muka (DP) 20 persen terlebih dahulu ketika pertunjukan berakhir harus sesegera mungkin penyelenggaraan konser musik harus melaporkan pajak namun kenyataan dilapangan target karcis/tiket tidak tercapai akhirnya penyelenggara konser musik mengajukan keberatan dengan berbagai alasan untuk tidak menyetorkan pajaknya secara penuh sehingga ini memberatkan atau menyulitkan untuk pemungutan pajak. Terkadang bisa beradu argumen di lapangan antara pihak penyelenggara dengan Pemda. Terkadang juga wajib pajak meminta penundaan untuk membayar pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar Pajak hiburan tidak menurun lagi yaitu:

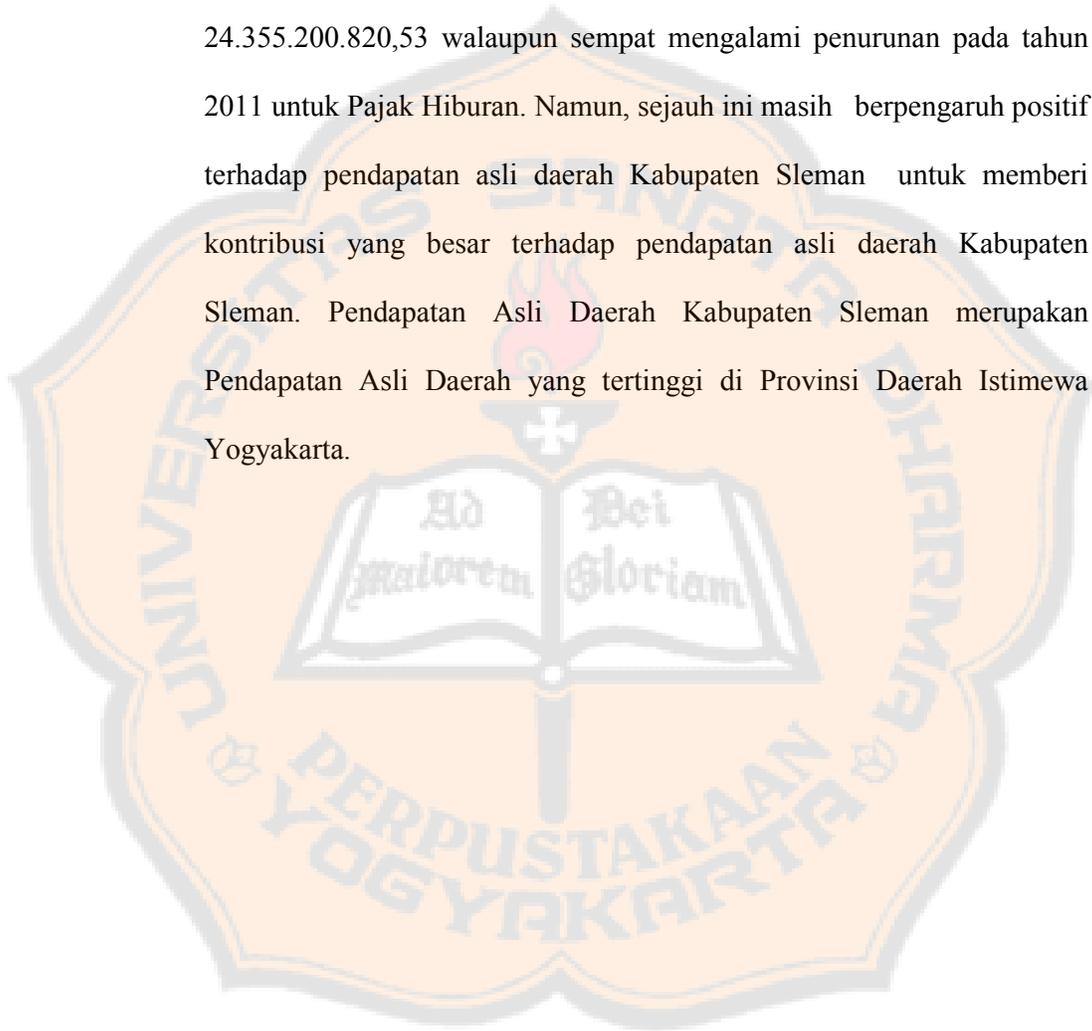
- a) Target pajak hiburan yang paling banyak adalah objek pajak hiburan yang bersifat eksidental dalam artian ketika banyak event-event di sleman sebisa mungkin pemda bisa melakukan pemungutan pajak dengan tarif yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- b) Pemda akan memantau setiap ada event-event yang berkaitan dengan pajak hiburan terutama event-event yang bersifat eksidental yang ada di Sleman. Kalau sifatnya sudah rutin pemda sudah bisa memperkirakan target yang harus dicapai.

- c) Berkaitan dengan keberadaan objek pajak hiburan terutama objek pajak yang baru Pemda selalu melakukan pendaftaran dan pendataan. Seperti objek pajak teater/bioskop kecil yang ada di Seturan diperlukan pendataan dan pendaftaran sebagai objek pajak yang baru.
- d) Pemantauan pada objek pajak dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
- e) Pemantauan terhadap SPT jika diperlukan.

4. Pengujian secara bersama-sama (simultan)

Berdasarkan hasil olahan SPSS, nilai R (*Adjusted R Square*) diperoleh 85,2% artinya bahwa pendapatan asli daerah dijelaskan oleh variabel independen (pajak reklame dan pajak hiburan) sebesar 85,2%, sedangkan 14,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain pajak reklame dan pajak hiburan yang tidak termasuk dalam model penelitian. Keputusan dapat diambil dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan, yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (pajak reklame dan pajak hiburan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah). Sehingga jika pajak reklame dan pajak hiburan naik maka akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tahun ketahun pajak reklame dan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan dari tahun 2000-2012 diperoleh Pajak Reklame sebesar Rp 67.125.731.715,74 dan Pajak Hiburan sebesar Rp 24.355.200.820,53 walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 untuk Pajak Hiburan. Namun, sejauh ini masih berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman untuk memberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,381 adalah lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,796, tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,600 adalah lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,796, ada pengaruh yang signifikan dari pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} sebesar 35,550 adalah lebih besar dari F_{tabel} sebesar 4,10. Walaupun pada penerimaan pajak hiburan sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 namun ini tidak menjadi masalah dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

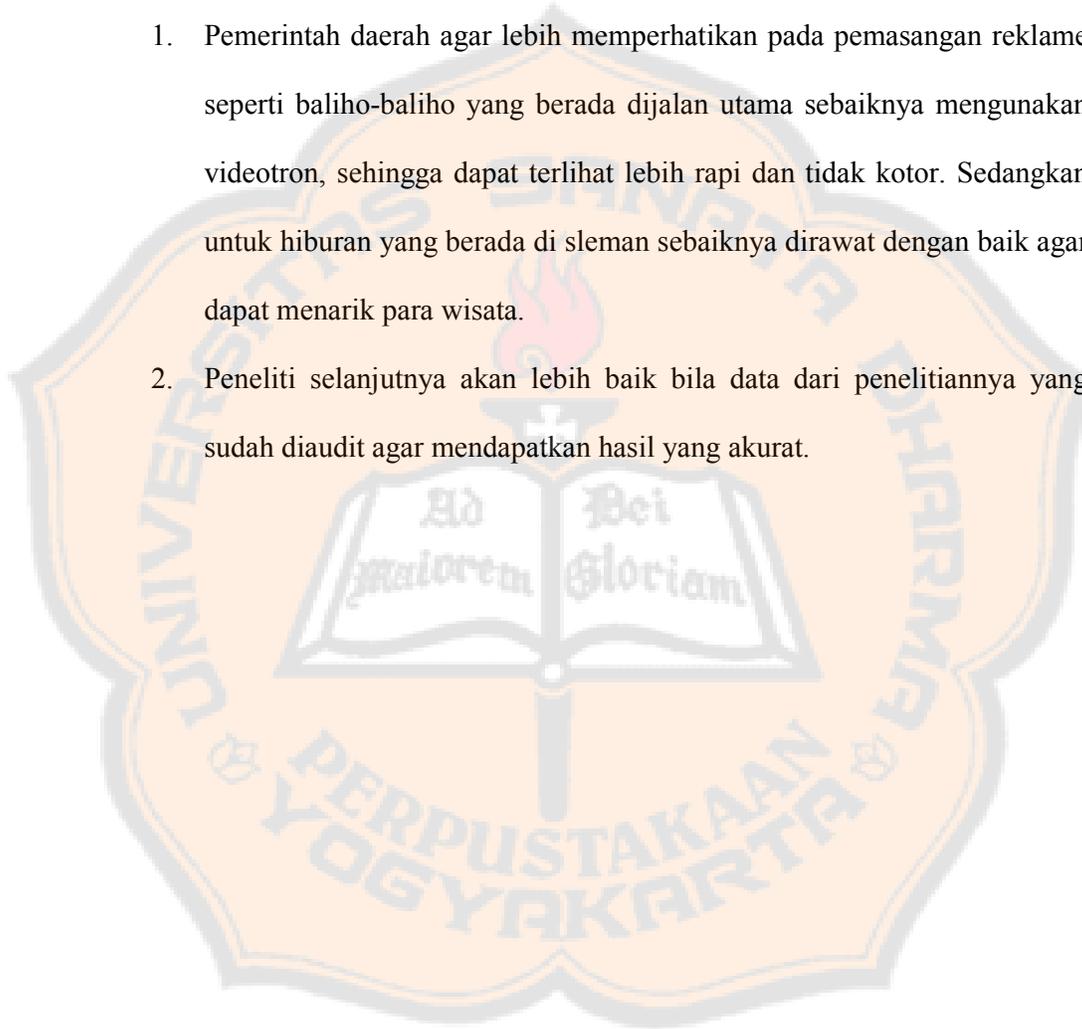
B. Keterbatasan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menggunakan data yang belum diaudit, sehingga ada kemungkinan data tersebut berubah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut:

1. Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pada pemasangan reklame seperti baliho-baliho yang berada di jalan utama sebaiknya menggunakan videotron, sehingga dapat terlihat lebih rapi dan tidak kotor. Sedangkan untuk hiburan yang berada di sleman sebaiknya dirawat dengan baik agar dapat menarik para wisata.
2. Peneliti selanjutnya akan lebih baik bila data dari penelitiannya yang sudah diaudit agar mendapatkan hasil yang akurat.



DAFTAR PUSTAKA

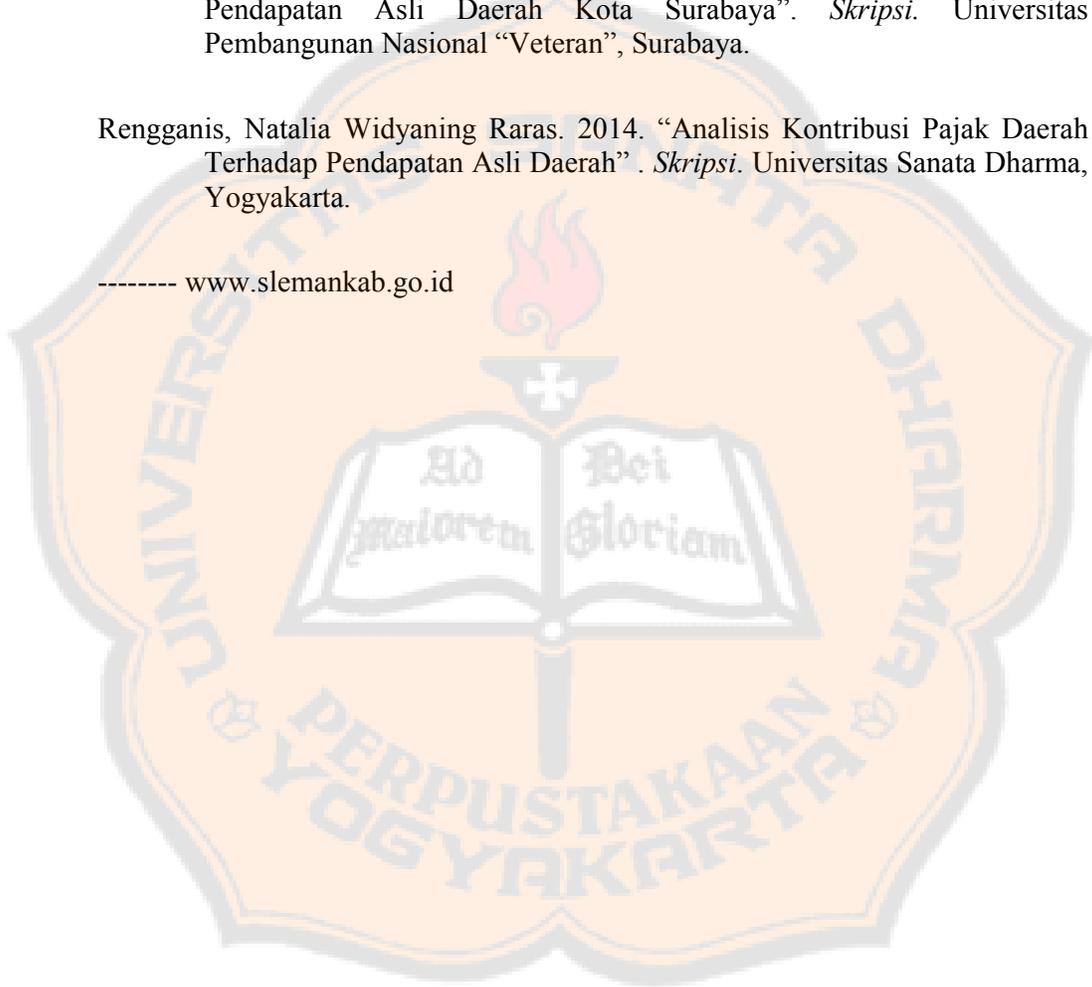
- Adi, Suryo Andreas. 2012. "Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2010. *Metodelogi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate lanjutan dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma*. 2010. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 14*. 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman, Sleman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3*. 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman, Sleman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4*. 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman, Sleman.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Putranty, Mawar Dwi. 2008. "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sulistyo, Joko. 2012. *6 hari jago SPSS*. Cakrawala, Yogyakarta.

Yudiyanto, Cornelius Tri. 2007. “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Wachdin, Faizah. 2010. “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya.

Rengganis, Natalia Widyaning Raras. 2014. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

----- www.slemankab.go.id





LAMPIRAN

Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2000-2007

Tahun	Target		Realisasi Pajak Reklame	
2000	Rp	308.725.000,00	Rp	315.077.374,70
2001	Rp	536.866.478,76	Rp	577.864.878,95
2002	Rp	622.554.388,95	Rp	832.927.225,91
2003	Rp	1.200.000.000,00	Rp	1.614.415.775,55
2004	Rp	2.817.000.000,00	Rp	3.511.364.429,19
2005	Rp	3.600.000.000,00	Rp	4.180.130.371,96
2006	Rp	3.800.000.000,00	Rp	4.454.870.618,39
2007	Rp	4.500.000.000,00	Rp	4.749.917.481,91
Total	Rp	17.385.145.867,71	Rp	20.236.568.156,56

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

Feedback Bulan Desember Pajak Reklame Tahun 2008-2012

Tahun	Target		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah s/d Bulan Ini	
2008	Rp	5.621.622.443,00	Rp	7.931.329.319,16	Rp	8.147.022.563,37
2009	Rp	6.800.000.000,00	Rp	7.672.697.036,27	Rp	9.010.860.114,49
2010	Rp	8.600.000.000,00	Rp	7.102.731.673,39	Rp	9.059.573.587,09
2011	Rp	8.750.000.000,00	Rp	8.675.531.912,01	Rp	9.322.567.271,01
2012	Rp	9.000.000.000,00	Rp	9.827.537.206,22	Rp	11.340.140.023,22
Total	Rp	38.771.622.443,00	Rp	41.209.827.147,05	Rp	46.880.163.559,18

Sumber: Dispenda Kabupaten Sleman

Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2000-2007

Tahun	Target		Realisasi Pajak Hiburan	
2000	Rp	200.000.000,00	Rp	334.162.268,55
2001	Rp	519.502.000,00	Rp	557.919.626,36
2002	Rp	526.700.000,00	Rp	658.988.493,25
2003	Rp	550.000.000,00	Rp	587.364.697,55
2004	Rp	600.000.000,00	Rp	887.618.389,17
2005	Rp	800.000.000,00	Rp	835.458.981,41
2006	Rp	900.000.000,00	Rp	959.443.926,28
2007	Rp	1.500.000.000,00	Rp	2.035.377.677,33
Total	Rp	5.596.202.000,00	Rp	6.856.334.059,90

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

Feedback Bulan Desember Pajak Hiburan Tahun 2008-2012

Tahun	Target		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah s/d Bulan Ini
2008	Rp	2.300.000.000,00	Rp 3.233.528.824,30	Rp 320.138.206,80	Rp 3.553.667.031,10
2009	Rp	2.600.000.000,00	Rp 3.353.229.251,10	Rp 284.129.190,06	Rp 3.637.358.441,16
2010	Rp	3.500.000.000,00	Rp 3.603.880.719,51	Rp 189.632.521,90	Rp 3.793.513.241,41
2011	Rp	3.200.000.000,00	Rp 2.492.142.257,60	Rp 217.692.627,80	Rp 2.709.834.885,40
2012	Rp	2.600.000.000,00	Rp 3.375.023.457,58	Rp 429.469.703,98	Rp 3.804.493.161,56
Total	Rp	14.200.000.000,00	Rp 16.057.804.510,09	Rp 1.441.062.250,54	Rp 17.498.866.760,63

Sumber: Dispenda Kabupaten Sleman

Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2000-2007

Tahun	Target		Realisasi PAD	
2000	Rp	15.829.886.951,00	Rp	17.889.883.435,46
2001	Rp	26.616.137.717,36	Rp	29.571.153.214,43
2002	Rp	34.846.979.981,95	Rp	38.908.192.767,97
2003	Rp	43.494.246.800,00	Rp	52.978.731.465,50
2004	Rp	53.919.261.011,00	Rp	70.499.050.996,77
2005	Rp	39.624.263.453,00	Rp	46.759.870.041,06
2006	Rp	75.792.320.330,00	Rp	90.710.095.117,40
2007	Rp	94.896.446.720,00	Rp	120.656.548.721,00
Total	Rp	385.019.542.964,31	Rp	467.973.525.759,59

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman

Feedback Bulan Desember Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Target		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah s/d Bulan Ini
2008	Rp	106.751.631.343,00	Rp 124.347.224.919,25	Rp 14.398.452.694,01	Rp 138.745.677.613,26
2009	Rp	128.918.153.263,99	Rp 143.786.386.068,99	Rp 13.818.144.313,85	Rp 157.604.530.382,84
2010	Rp	163.530.209.690,15	Rp 147.311.015.276,64	Rp 16.132.256.643,13	Rp 163.443.271.919,77
2011	Rp	203.766.407.218,00	Rp 200.373.881.893,01	Rp 26.734.289.221,46	Rp 227.108.171.114,47
2012	Rp	241.003.081.720,31	Rp 262.319.779.792,66	Rp 38.749.759.491,47	Rp 301.069.539.284,13
Total	Rp	843.969.483.235,45	Rp 878.138.287.950,55	Rp109.832.902.363,92	Rp 987.971.190.314,47

Sumber: Dispenda Kabupaten Sleman

Hasil Output SPSS pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	PAJAK REKLAME	PAJAK HIBURAN
N		13	13	13
Normal Parameters ^a	Mean	111995720467.2354	5162825516.5954	1873476986.1946
	Std. Deviation	84371505181.63344	3814299601.82939	1419785444.64938
Most Extreme Differences	Absolute	.150	.168	.279
	Positive	.150	.158	.279
	Negative	-.132	-.168	-.189
Kolmogorov-Smirnov Z		.541	.604	1.005
Asymp. Sig. (2-tailed)		.931	.858	.265

a. Test distribution is Normal.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6078739412.970	15599985154.653	.390	.705		
	Pajak Reklame	24.805	7.337	3.381	.007	.112	8.922
	Pajak Hiburan	-11.822	19.710	-.600	.562	.112	8.922

a. Dependent Variable: PAD

Coefficient Correlations^a

Model		Pajak Hiburan	Pajak Reklame
1	Correlations		
		1.000	-.942
		-.942	1.000
Covariances	Pajak Hiburan	388.481	-136.258
	Pajak Reklame	-136.258	53.825

a. Dependent Variable: PAD

Correlations

		PAD	Pajak Reklame	Pajak Hiburan
Pearson Correlation	PAD	1.000	.934	.858
	Pajak Reklame	.934	1.000	.942
	Pajak Hiburan	.858	.942	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000
	Pajak Reklame	.000	.	.000
	Pajak Hiburan	.000	.000	.
N	PAD	13	13	13
	Pajak Reklame	13	13	13
	Pajak Hiburan	13	13	13

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.936 ^a	.877	.852	.877	35.550	2	10	.000	1.035

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

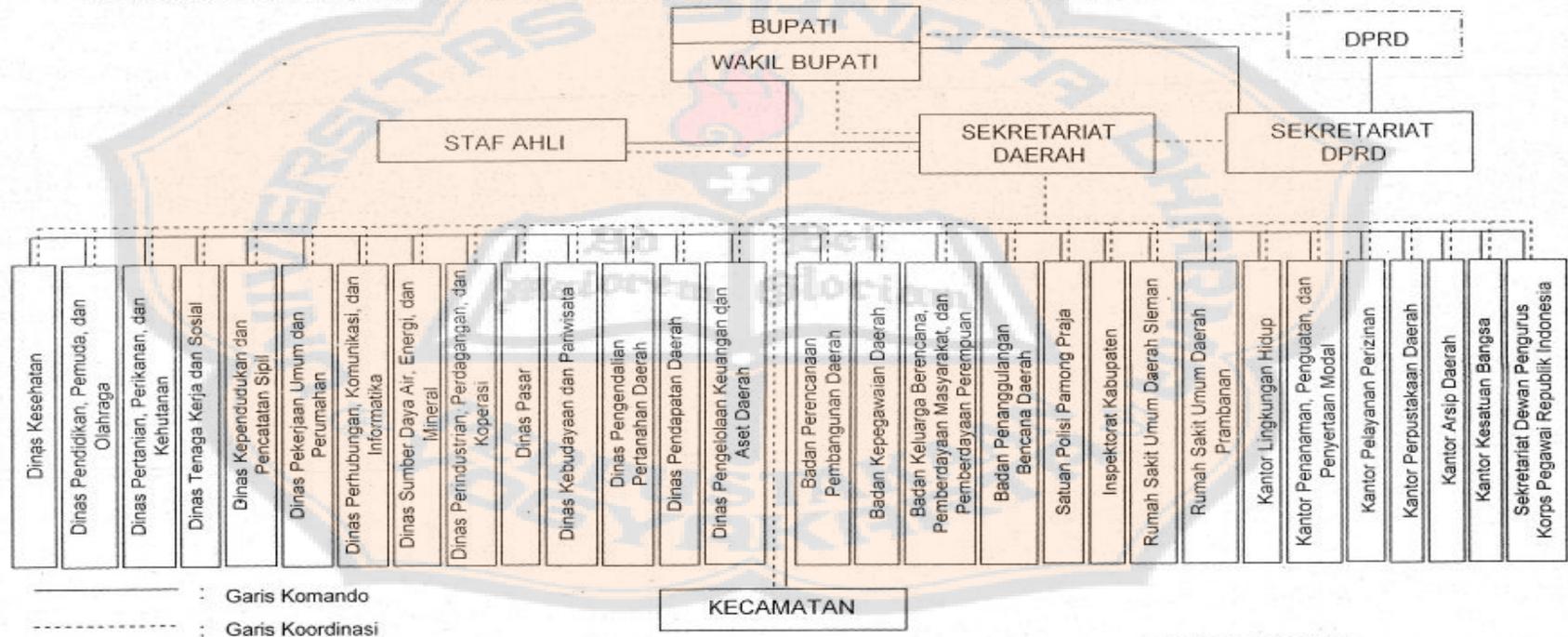
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74889557165024420000000.000	2	37444778582512210000000.000	35.550	.000 ^a
	Residual	10533053474348384000000.000	10	1053305347434838500000.000		
	Total	85422610639372800000000.000	12			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: PAD

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 12 Tahun 2011
 TANGGAL : 10 Oktober 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

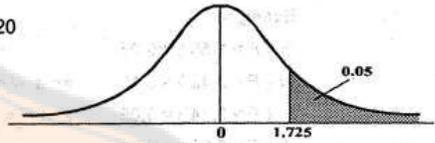
TABLE D. 2 PERCENTAGE POINTS OF THE *t* DISTRIBUTION

Example

$\Pr (t > 2.086) = 0.025$

$\Pr (t > 1.725) = 0.05$ for $df = 20$

$\Pr (|t| > 1.725) = 0.10$

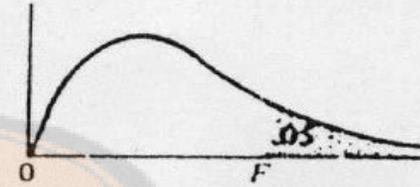


df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.010	0.002
1		1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2		0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3		0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.214
4		0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5		0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6		0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7		0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8		0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9		0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10		0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11		0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12		0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13		0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14		0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15		0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16		0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17		0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18		0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19		0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20		0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21		0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22		0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23		0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24		0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25		0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26		0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27		0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28		0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29		0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30		0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40		0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
60		0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
120		0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160
∞		0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

Note: The smaller probability shown at the head of each column is the area in one tail; the larger probability is the area in both tails.

Source: From E. S. Pearson and H. O. Hartley, eds., *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, 3d ed., table 12, Cambridge University Press, New York, 1966. Reproduced by permission of the editors and trustees of *Biometrika*.

Critical Values of F_{α, u_1, u_2} for $\alpha = .05$



		$u_1 = \text{Degrees of freedom for numerator}$																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞	
$u_2 = \text{Degrees of freedom for denominator}$	1	181	200	218	235	250	264	277	289	301	312	324	336	347	358	369	380	391	402	413	
	2	18.5	19.0	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
	3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53	8.53
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63	5.63
	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37	4.37
	6	5.99	5.14	4.75	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67	3.67
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23	3.23
	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93	2.93
	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71	2.71
	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.84	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54	2.54
	11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40	2.40
	12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30	2.30
	13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21	2.21
	14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.37	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13	2.13
	15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.32	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07	2.07
	16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01	2.01
	17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96	1.96
	18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92	1.92
	19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88	1.88
	20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84	1.84
	21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.48	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81	1.81
	22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78	1.78
	23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.12	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76	1.76
	24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73	1.73
	25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71	1.71
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62	1.62	
40	4.08	3.23	2.81	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51	1.51	
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.81	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39	1.39	
74	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.68	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25	1.25	
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00	1.00	

TABLE D.5A

DURBIN-WATSON D STATISTIC : SIGNIFICANCE POINTS OF D_L AND D_U AT 0.05 AND 0.01 LEVELS OF SIGNIFICANCE

n	k' = 1		k' = 2		k' = 3		k' = 4		k' = 5		k' = 6		k' = 7		k' = 8		k' = 9		k' = 10	
	d _L	d _U																		
6	0.610	1.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.700	1.356	0.467	1.896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.763	1.332	0.559	1.777	0.368	2.287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.824	1.320	0.629	1.699	0.455	2.128	0.296	2.588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.879	1.320	0.697	1.641	0.525	2.016	0.376	2.414	0.243	2.822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.927	1.324	0.658	1.604	0.595	1.928	0.444	2.283	0.316	2.645	0.203	3.005	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.971	1.331	0.612	1.579	0.658	1.864	0.512	2.177	0.379	2.506	0.268	2.832	0.171	3.149	—	—	—	—	—	—
13	1.010	1.340	0.661	1.562	0.715	1.816	0.574	2.094	0.445	2.390	0.328	2.692	0.230	2.985	0.147	3.266	—	—	—	—
14	1.045	1.350	0.905	1.551	0.767	1.779	0.632	2.030	0.505	2.296	0.389	2.572	0.286	2.848	0.200	3.111	0.127	3.360	—	—
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.220	0.447	2.472	0.343	2.727	0.251	2.979	0.175	3.216	0.111	3.438
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.157	0.502	2.388	0.398	2.624	0.304	2.860	0.222	3.090	0.155	3.304
17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.104	0.554	2.318	0.451	2.537	0.356	2.757	0.272	2.975	0.198	3.184
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.060	0.603	2.257	0.502	2.461	0.407	2.667	0.321	2.873	0.244	3.073
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.023	0.649	2.206	0.549	2.396	0.456	2.589	0.369	2.783	0.290	2.974
20	1.201	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.991	0.692	2.162	0.595	2.339	0.502	2.521	0.416	2.704	0.336	2.885
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.964	0.732	2.124	0.637	2.290	0.547	2.480	0.461	2.633	0.380	2.806
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.956	1.797	0.863	1.940	0.769	2.090	0.677	2.246	0.588	2.407	0.504	2.571	0.424	2.734
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.920	0.804	2.061	0.715	2.208	0.628	2.360	0.545	2.514	0.465	2.670
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.902	0.837	2.035	0.751	2.174	0.666	2.318	0.584	2.464	0.506	2.613
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.886	0.868	2.012	0.784	2.144	0.702	2.280	0.621	2.419	0.544	2.560
26	1.302	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.873	0.897	1.992	0.816	2.117	0.735	2.246	0.657	2.379	0.581	2.513
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.861	0.925	1.974	0.845	2.093	0.767	2.216	0.691	2.342	0.616	2.470
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.850	0.951	1.958	0.874	2.071	0.798	2.188	0.723	2.309	0.650	2.431
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.841	0.975	1.944	0.900	2.052	0.826	2.164	0.753	2.278	0.682	2.396
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.833	0.998	1.931	0.926	2.034	0.854	2.141	0.782	2.251	0.712	2.363
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.825	1.020	1.920	0.950	2.018	0.879	2.120	0.810	2.226	0.741	2.333
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.819	1.041	1.909	0.972	2.004	0.904	2.102	0.836	2.203	0.769	2.306
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.813	1.061	1.900	0.994	1.991	0.927	2.085	0.861	2.181	0.795	2.281
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.808	1.080	1.891	1.015	1.979	0.950	2.069	0.885	2.162	0.821	2.257
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.803	1.097	1.884	1.034	1.967	0.971	2.054	0.908	2.144	0.845	2.236
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.799	1.114	1.877	1.053	1.957	0.991	2.041	0.930	2.127	0.868	2.216
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.795	1.131	1.870	1.071	1.948	1.011	2.029	0.951	2.112	0.891	2.198
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.792	1.146	1.864	1.088	1.939	1.029	2.017	0.970	2.098	0.912	2.180
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.656	1.273	1.722	1.218	1.789	1.161	1.859	1.104	1.932	1.047	2.007	0.990	2.085	0.932	2.164
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.786	1.175	1.854	1.120	1.924	1.064	1.997	1.008	2.072	0.952	2.149
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.287	1.776	1.238	1.835	1.189	1.895	1.139	1.958	1.089	2.022	1.038	2.088
50	1.503	1.586	1.462	1.628	1.421	1.674	1.378	1.721	1.335	1.771	1.291	1.822	1.246	1.875	1.201	1.930	1.156	1.986	1.110	2.044
55	1.528	1.601	1.490	1.641	1.452	1.681	1.414	1.724	1.374	1.768	1.334	1.814	1.294	1.861	1.253	1.909	1.212	1.959	1.170	2.010
60	1.549	1.616	1.514	1.652	1.480	1.689	1.444	1.727	1.408	1.767	1.372	1.808	1.335	1.850	1.298	1.894	1.260	1.939	1.222	1.984
65	1.567	1.629	1.536	1.662	1.503	1.696	1.471	1.731	1.438	1.767	1.404	1.805	1.370	1.843	1.336	1.882	1.301	1.923	1.266	1.964
70	1.583	1.641	1.554	1.672	1.525	1.703	1.494	1.735	1.464	1.768	1.433	1.802	1.401	1.837	1.369	1.873	1.337	1.910	1.305	1.948
75	1.598	1.652	1.571	1.680	1.543	1.709	1.515	1.739	1.487	1.770	1.458	1.801	1.428	1.834	1.399	1.867	1.369	1.901	1.339	1.935
80	1.611	1.662	1.586	1.688	1.560	1.715	1.534	1.743	1.507	1.772	1.480	1.801	1.453	1.831	1.425	1.861	1.397	1.893	1.369	1.925
85	1.624	1.671	1.600	1.696	1.575	1.721	1.550	1.747	1.525	1.774	1.500	1.801	1.474	1.829	1.448	1.857	1.422	1.886	1.396	1.916
90	1.635	1.679	1.612	1.703	1.589	1.726	1.566	1.751	1.542	1.776	1.518	1.801	1.494	1.827	1.469	1.854	1.445	1.881	1.420	1.909
95	1.645	1.687	1.623	1.709	1.602	1.732	1.579	1.755	1.557	1.778	1.535	1.802	1.512	1.827	1.489	1.852	1.465	1.877	1.442	1.903
100	1.654	1.694	1.634	1.715	1.613	1.736	1.592	1.758	1.571	1.780	1.550	1.803	1.528	1.826	1.506	1.850	1.484	1.874	1.462	1.898
150	1.720	1.746	1.706	1.760	1.693	1.774	1.679	1.788	1.665	1.802	1.651	1.817	1.637	1.832	1.622	1.847	1.608	1.862	1.594	1.877
200	1.758	1.778	1.748	1.789	1.738	1.799	1.728	1.810	1.718	1.820	1.707	1.831	1.697	1.841	1.686	1.852	1.675	1.863	1.665	1.874



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI

Nomor : 31/Kaprodi Akt./255/II/2014

7 Februari 2014

Lamp : -----

Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jl. Parasmya Beran Tridadi, Sleman Yogyakarta.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Septri Sitanggang
NIM : 102114091
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII

Akan melaksanakan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jl. Parasmya Beran Tridadi, Sleman Yogyakarta

Waktu : Februari-April 2014

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengijinkan mahasiswa di atas untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak /Ibu Pimpin.

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi

Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, Akt., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasmya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: siemankab.go.id, E-mail : bappeda@siemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 501 / 2014

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/492/2014 Tanggal : 10 Februari 2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SEPTRI SITANGGANG
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 102114091
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Alamat Rumah : Jl. Gatot Kaca No. 3 RT 17 REW 07, Mrican Yogyakarta
No. Telp / HP : 085793242034
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : DPKAD dan Dipenda Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 10 Februari 2014 s/d 10 Mei 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 10 Februari 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM

Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala DPKAD Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Ketua Prodi Akuntansi - USD Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

Hasil Wawancara

Nama : Deni Ria Setiawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan dan Pengendalian
Tanggal : 30 Mei 2014

1. Mengapa Pajak Hiburan tahun 2011 menurun dan tidak mencapai target?

Pajak Hiburan menurun dan tidak mencapai target karena adanya perubahan undang-undang terbaru, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 52/PUU-IX/2011, pajak hiburan untuk golf yang didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

2. Mengapa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah? (berkaitan dengan data diolah)

Pajak daerah tidak berpengaruh karena objek pajak hiburan ada yang bersifat eksindentil. Maksud dari eksindentil dimana pajak hiburan yang pemungutannya tidak direncanakan ketika ada pertunjukan/event diluar dari yang direncana. Ketika tidak ada event maka penerimaan pajak hiburan akan mengalami penurunan dan itu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagaimana upaya pemerintah agar pajak hiburan tidak menurun lagi?

- Target pajak hiburan yang paling banyak adalah objek pajak hiburan yang bersifat eksidental dalam artian ketika banyak event-event di Sleman sebisa mungkin pemda bisa melakukan pemungutan pajak dengan tarif yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman.
- Pemda akan memantau setiap ada event-event yang berkaitan dengan pajak hiburan terutama event-event yang bersifat eksidental yang ada di Sleman. Kalau sifatnya sudah rutin pemda sudah bisa memperkirakan target yang harus dicapai.
- Berkaitan dengan keberadaan objek pajak hiburan terutama objek pajak yang baru Pemda selalu melakukan pendaftaran dan pendataan. Seperti objek pajak teater/bioskop kecil yang ada di Seturan diperlukan pendataan dan pendaftaran sebagai objek pajak yang baru.
- Pemantauan pada objek pajak dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
- Pemantauan terhadap SPT jika diperlukan.

4. Apakah ada kendala/kesulitan dalam ketika pemungutan pajak hiburan?

Kendala pasti ada, jika ketika ada konser musik pada saat korporasi tiket harus menyerahkan uang muka (DP) 20 persen terlebih dahulu ketika pertunjukan berakhir harus sesegera mungkin penyelenggaran konser musik harus melaporkan pajak namun kenyataan dilapangan target karcis/tiket tidak tercapai akhirnya penyelenggara konser musik mengajukan keberatan dengan berbagai alasan untuk

tidak menyetorkan pajaknya secara penuh sehingga ini memberatkan atau menyulitkan untuk pemungutan pajak. Terkadang bisa beradu argumen di lapangan antara pihak penyelenggara dengan Pemda. Terkadang juga wajib pajak meminta penundaan untuk membayar pajak.

5. Faktor-faktor apa yang pengaruhi pajak reklame?

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak reklame ini sudah ada tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2011 yaitu:

- Jenis reklame
- Harga bahan reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame
- Lokasi penempatan reklame ditetapkan berdasarkan kelas jalan
- Waktu dan jangka waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dalam satuan hari dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
- Jumlah reklame yang dipasang
- Ukuran media reklame ditetapkan dalam satuan meter persegi

6. Bagaimana upaya pemerintah agar pajak reklame terus meningkat?

Upaya pemerintah agar pajak reklame terus meningkat yaitu:

- ♣ Penataan dan pemantauan titik-titik reklame yang sesuai dengan titik-titik median
- ♣ Melakukan pemantauan apakah ada reklame liar di titik-titik median, jika ada ada reklame liar pemda akan menertibkan reklame liar.
- ♣ Melakukan pemantauan untuk masa tayang, jika masa tayang yang akan habis maka pemda akan memberi tahu lewat media telepon kepada wajib pajak bahwa masa tayang reklame akan habis. Jika lewat media telepon tidak ada tanggapan dari wajib pajak dan masa tayang sudah melebihi dari masa tayang maka pemda akan memberi tahu lewat surat teguran kepada wajib pajak.

7. Apakah pajak reklame memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah?

Jelas iya, karena pajak reklame merupakan pajak yang besar dari pajak-pajak daerah yang lain dan itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah sleman. Pajak reklame dapat diperkirakan target penerimaannya sedangkan pajak hiburan kurang dapat diperkirakan karena ada pajak yang bersifat eksidental itu. Pajak reklame juga setiap tahunnya terus meningkat penerimaan pajak reklamenya.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tirdadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
 Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

**FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BULAN DESEMBER 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
			S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9
1 20 1 20 28	DINAS PENDAPATAN DAERAH						
4 1 01	PAJAK DAERAH						
4 1 01 01	1. Pajak Hotel	25,000,000,000.00	28,549,716,950.48	3,667,269,869.59	32,216,986,820.07	128.87	7,216,986,820.07
4 1 01 02	2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	15,042,204,693.28	1,716,677,502.50	16,758,882,195.78	119.71	2,758,882,195.78
4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	2,600,000,000.00	3,375,023,457.58	429,469,703.98	3,804,493,161.56	146.33	1,204,493,161.56
4 1 01 04	4. Pajak Reklame	9,000,000,000.00	9,827,537,206.22	1,512,602,817.00	11,340,140,023.22	126.00	2,340,140,023.22
4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	40,500,000,000.00	37,691,452,888.00	3,854,078,431.00	41,545,531,319.00	102.58	1,045,531,319.00
4 1 01 11	6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	5,500,000,000.00	6,869,995,050.00	1,150,165,275.00	8,020,160,325.00	145.82	2,520,160,325.00
4 1 01 07	7. Pajak Parkir	750,000,000.00	781,305,117.00	74,713,165.00	856,018,282.00	114.14	106,018,282.00
4 1 01 08	8. Pajak Air Tanah(SDAEM)	1,500,000,000.00	1,743,307,856.36	129,646,621.20	1,872,954,477.56	124.86	372,954,477.56
4 1 01 09	9. Pajak BPHTB	49,500,000,000.00	52,476,130,244.78	8,944,573,301.50	61,420,703,546.28	124.08	11,920,703,546.28
	Jumlah A	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150.47
4 1 2	RETRIBUSI						
4 1 2 02 10	1. Tempat Rekreasi dan OR	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
	- Katurang	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
	- Sewa lahan reklame	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
	Jumlah 1	149,950,000,000.00	158,178,509,112.09	21,670,569,215.59	179,849,078,327.68	119.94	29,899,078,327.68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	20 1 20 07	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
A		RETRIBUSI						
4	1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	444,500,000.00	387,075,160.00	46,795,000.00	433,870,160.00	97.61	(10,629,840.1
4	1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	41,500,000.00	83,333,160.00	3,525,000.00	86,858,160.00	209.30	45,358,160.
		- Wisma Sembada	25,000,000.00	5,890,000.00	875,000.00	6,765,000.00	27.06	(18,235,000.
		- Gd. Serba Guna	15,000,000.00	38,162,500.00	2,500,000.00	40,662,500.00	271.08	25,662,500.
		- Gedung-gedung	0.00	38,268,160.00	0.00	38,268,160.00	#DIV/0!	38,268,160.
		- Ruang Pertemuan/Perkantoran	1,500,000.00	1,012,500.00	150,000.00	1,162,500.00	77.50	(337,500.
4	1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	21,000,000.00	68,350,000.00	0.00	68,350,000.00	325.48	47,350,000.
4	1 2 02 01	c. Sewa Bus	7,000,000.00	32,250,000.00	3,800,000.00	36,050,000.00	515.00	29,050,000.
		d. Sewa Rumah Dinas	0.00	2,180,400.00	0.00	2,180,400.00	#DIV/0!	2,180,400.
		e. Sewa Tanah	0.00	5,319,600.00	0.00	5,319,600.00	#DIV/0!	5,319,600.
		f. Gd. Olah Raga	25,000,000.00	86,205,000.00	9,390,000.00	95,595,000.00	382.38	70,595,000.
4	1 2 02 10	g. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo	350,000,000.00	109,437,000.00	30,080,000.00	139,517,000.00	39.86	(210,483,000.
		Jumlah A	444,500,000.00	387,075,160.00	46,795,000.00	433,870,160.00	97.61	(10,629,840.1
B	4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN						
		Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perush Milik Daerah/BUMD	11,304,155,425.71	12,429,054,998.98	0.00	12,429,054,998.98	109.95	1,124,899,573.
4	1 3 01	a. PD. BPR Bank Sleman	3,000,000,000.00	3,162,885,795.00	0.00	3,162,885,795.00	105.43	162,885,795.
4	1 3 01 01	a. PD. BPR Bank Sleman	8,304,155,425.71	9,266,169,203.98	0.00	9,266,169,203.98	111.58	962,013,778.
4	1 3 01 02	b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(55,000,000.
4	1 3 01 03	c. Bagian Laba PDAM	11,359,155,425.71	12,429,054,998.98	0.00	12,429,054,998.98	109.42	1,069,899,573.
		Jumlah B						
C	4 1 4	LAIN-LAIN PAD	0.00	265,305,000.00	0.00	265,305,000.00	#DIV/0!	265,305,000.
4	1 4 01	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.
4	1 4 01 01	a. Rumah Dinas	0.00	114,650,000.00	0.00	114,650,000.00	#DIV/0!	114,650,000.
4	1 4 01 02	b. Barang Inventaris/Penghapusan	0.00	112,955,000.00	0.00	112,955,000.00	#DIV/0!	112,955,000.
4	1 4 01 05	c. Kendaraan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.
4	1 4 01 08	d. Hasil Penebangan Pohon/Penjualan Kayu	0.00	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	#DIV/0!	37,700,000.
4	1 4 01 10	e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/penghapusan	918,158,695.00	2,015,445,653.00	50,020,164.00	2,065,465,817.00	224.96	1,147,307,122.
4	1 4 02	2. Penerimaan Jasa Giro/Bunga	918,158,695.00	1,941,827,704.00	50,020,164.00	1,991,847,868.00	216.94	1,073,689,173.
4	1 4 02 01	a. Jasa Giro Kas Da/Bank	0.00	73,162,012.00	0.00	73,162,012.00	#DIV/0!	73,162,012.
4	1 4 02 02	b. Jasa Giro PK (Bendaharawan *)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.
4	1 4 02 03	c. Jasa Giro Dana Cadangan	0.00	455,937.00	0.00	455,937.00	#DIV/0!	455,937.
4	1 4 02 04	d. Jasa Giro Penguatan Modal *)	8,000,000,000.00	10,152,734,268.20	1,561,791,067.61	11,714,525,335.81	146.43	3,714,525,335.
4	1 4 03	3. Penerimaan Bunga Deposito via BPD	0.00	432,755,334.21	281,300,772.00	714,056,106.21	#DIV/0!	714,056,106.
4	1 4 04	4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *)	0.00	810,348.00	37,621,857.00	38,432,205.00	#DIV/0!	38,432,205.
4	1 4 06	5. Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan *)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.
4	1 4 07	6. Pendapatan Denda Pajak	0.00	176,524,800.00	2,806,653.00	179,331,453.00	#DIV/0!	179,331,453.
4	1 4 10 03	7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan : *)	0.00	176,524,800.00	2,806,653.00	179,331,453.00	#DIV/0!	179,331,453.
		a. Sebelum Tahun 2012	0.00	106,374,043.89	3,992,260.00	110,366,303.89	#DIV/0!	110,366,303.
4	1 4 16	8. Lain-lain *)	8,918,158,695.00	13,149,949,447.30	1,937,532,773.61	15,087,482,220.91	169.18	6,169,323,525.
		Jumlah C	8,918,158,695.00	13,149,949,447.30	1,937,532,773.61	15,087,482,220.91	169.18	6,169,323,525.
		Jumlah 2	20,721,814,120.71	25,965,079,806.28	1,984,327,773.61	27,950,407,379.89	134.88	7,228,593,259.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	4 02 1 02 01	DINAS KESEHATAN						
	4 1 4 15 01	LAIN-LAIN PAD Pelayanan Kesehatan via rekening BLUD	8,856,522,421.00	8,265,268,879.00	3,257,241,676.00	11,522,510,555.00	130.10	2,665,988,134.00
	4 1 4	a. Pasien Rawat Jalan	8,856,522,421.00	6,876,942,493.00	966,191,498.00	7,843,133,991.00	88.56	(1,013,388,430.00)
	4 1 4	b. Puskesmas Rawat Inap	0.00	492,261,500.00	82,127,100.00	574,388,600.00	#DIV/0!	574,388,600.00
	4 1 4	c. UPT Lab. Kesehatan	0.00	228,668,200.00	26,341,500.00	255,009,700.00	#DIV/0!	255,009,700.00
	4 1 4	e. Klaim Askes	0.00	30,720,900.00	6,799,650.00	37,520,550.00	#DIV/0!	37,520,550.00
	4 1 4	f. Kapitasi Askes	0.00	512,686,000.00	114,134,500.00	626,820,500.00	#DIV/0!	626,820,500.00
	4 1 4	g. PKL	0.00	87,208,800.00	15,485,500.00	102,694,300.00	#DIV/0!	102,694,300.00
	4 1 4	h. Bunga Bank	0.00	17,239,528.00	108,576,147.00	125,815,675.00	#DIV/0!	125,815,675.00
	4 1 4	i. Pendapatan premi Mandiri JPKM	0.00	0.00	1,936,090,000.00	1,936,090,000.00	#DIV/0!	1,936,090,000.00
	4 1 4	j. Pendapatan Lainnya	0.00	19,541,458.00	1,495,781.00	21,037,239.00	#DIV/0!	21,037,239.00
		Jumlah 3	8,856,522,421.00	8,265,268,879.00	3,257,241,676.00	11,522,510,555.00	130.10	2,665,988,134.00
4	1 02 1 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN						
	4 1 4 15 01	Lain-lain PAD via rekening BLUD	36,489,500,000.00	35,187,574,452.77	8,716,858,963.60	43,904,433,416.37	120.32	7,414,933,416.37
	4 1 4 15 01	- Pelayanan Kesehatan	36,489,500,000.00	35,089,610,865.77	8,690,635,783.60	43,780,246,649.37	119.98	7,290,746,649.37
	4 1 4 15 01	- Jasa Giro	0.00	97,963,587.00	26,223,180.00	124,186,767.00	#DIV/0!	124,186,767.00
		Jumlah 4	36,489,500,000.00	35,187,574,452.77	8,716,858,963.60	43,904,433,416.37	120.32	7,414,933,416.37
5	1 02 1 02 03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN						
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan/Sebelum BLUD	0.00	84,767,497.00	0.00	84,767,497.00	#DIV/0!	84,767,497.00
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD	2,082,500,000.00	2,790,424,519.54	235,605,181.00	3,026,029,700.54	145.31	943,529,700.54
	4 1 4	Pelayanan Kesehatan Via rekening BLUD *)	2,082,500,000.00	2,780,674,394.54	233,521,719.00	3,014,196,113.54	144.74	931,696,113.54
		- Jasa Giro	0.00	9,750,125.00	2,083,462.00	11,833,587.00	#DIV/0!	11,833,587.00
		Jumlah 5	2,082,500,000.00	2,875,192,016.54	235,605,181.00	3,110,797,197.54	149.38	84,767,497.00
6	1 20 1 20 08	DINAS PASAR						
		RETRIBUSI						
	4 1 2 01 01	1. Pelayanan Pasar :	3,827,669,400.00	3,664,032,175.00	329,031,250.00	3,993,064,425.00	104.32	165,395,025.00
	4 1 2 01 01	a. Retribusi Pasar	2,045,964,875.00	1,925,455,700.00	176,961,400.00	2,102,417,100.00	102.76	56,452,225.00
	4 1 2 01 01	b. Kios	721,343,950.00	665,573,925.00	55,607,075.00	721,181,000.00	99.98	(162,950.00)
	4 1 2 01 01	c. MCK	74,679,000.00	73,553,000.00	5,927,000.00	79,480,000.00	106.43	4,801,000.00
	4 1 2 01 01	d. Lerepan	159,117,000.00	158,219,850.00	14,940,200.00	173,160,050.00	108.83	14,043,050.00
	4 1 2 01 01	e. Sampah	800,301,975.00	780,704,200.00	72,817,575.00	853,521,775.00	106.65	53,219,800.00
	4 1 2 01 01	f. Ijin	20,761,600.00	45,230,500.00	1,668,000.00	46,898,500.00	225.89	26,136,900.00
	4 1 2 01 01	g. Pemakaian Fasilitas Air	945,000.00	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	116.40	155,000.00
	4 1 2 01 01	h. Bongkar Muat	4,556,000.00	14,396,000.00	910,000.00	15,306,000.00	335.95	10,750,000.00
	4 1 2 01 01	2. Pemanfaatan Kekayaan Daerah	218,013,000.00	435,495,630.00	47,892,000.00	483,387,630.00	221.72	265,374,630.00
		- Pasar	35,928,000.00	166,623,100.00	11,988,000.00	178,611,100.00	497.14	142,683,100.00
		- Taman Kuliner Condongcatur	182,085,000.00	222,452,530.00	3,631,000.00	226,083,530.00	124.16	43,998,530.00
		- Resto Mrican	0.00	46,420,000.00	32,273,000.00	78,693,000.00	#DIV/0!	78,693,000.00
		LAIN-LAIN PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4	- Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		Jumlah 6	4,045,682,400.00	4,099,528,805.00	376,923,250.00	4,476,452,055.00	110.65	430,769,655.00

*) Pemindahbukuan dari Rekening Kasda 30/04/2012 Rp. 476.892.897.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1 20 1 20 03	SEKRETARIAT DAERAH						
	4 1 3 01	1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pershn. Milik Daerah	354,066,735.60	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	100.00	200.91
	4 1 3 01 03	- BUKP	300,265,330.32	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	117.92	53,801,606.2
		- Dana Pembinaan	30,743,660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30,743,660.1
		- Jasa Produksi	23,057,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,057,745.1
		Jumlah 7	354,066,735.60	354,066,936.58	0.00	354,066,936.58	100.00	200.91
9	1 03 1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN						
A	4 1 2	RETRIBUSI DAERAH						
	4 1 2 01 02	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,000,000,000.00	1,231,588,460.00	181,950,415.00	1,413,538,875.00	141.35	413,538,875.00
	4 1 2 01 02	a. Perumahan, Depo	625,000,000.00	734,807,245.00	96,672,000.00	831,479,245.00	133.04	206,479,245.0
	4 1 2 01 02	b. Pabrik, Hotel, Restoran, Rumah Sakit	375,000,000.00	496,781,215.00	85,278,415.00	582,059,630.00	155.22	207,059,630.0
	4 1 2 01 02		86,880,000.00	129,550,000.00	21,900,000.00	151,450,000.00	174.32	64,570,000.00
	4 1 2 01 04	2. Pelayanan Pemakaman	1,599,240,640.00	1,562,796,150.00	115,915,440.00	1,678,711,590.00	104.97	79,470,950.00
	4 1 2 02 01	3. Pemakaian Kekayaan Daerah	11,434,400.00	10,703,500.00	236,000.00	10,939,500.00	95.67	494,900.00
	4 1 2 01 01	a. Sewa Alat Laborat & alat konstruksi	86,450,000.00	147,398,000.00	17,066,000.00	164,464,000.00	190.24	78,014,000.00
	4 1 2 01 01	b. Sewa Alat -alat Berat	68,450,000.00	111,838,000.00	15,116,000.00	126,954,000.00	185.47	58,504,000.00
		- Steam Walfs & Vibro	78,000,000.00	26,760,000.00	1,950,000.00	28,710,000.00	159.50	10,710,000.00
		- Flat Bed Truck	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	#DIV/0!	8,800,000.00
		- Wheel Loader	1,501,356,240.00	1,404,694,650.00	98,613,440.00	1,503,308,090.00	100.13	1,951,850.00
	4 1 2 03 01	4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	4,900,000,000.00	14,551,790,409.00	1,247,266,314.07	15,799,056,723.07	322.43	10,899,056,723.0
	4 1 2 3 01	a. IMB	3,540,000,000.00	9,411,541,418.00	914,620,075.00	10,326,161,493.00	291.70	6,786,161,493.0
	4 1 2 3	b. Penelitian IMB/Prasarana BG	100,000,000.00	1,069,775,880.00	89,190,169.00	1,158,966,049.00	1,158.97	1,058,966,049.0
	4 1 2 3	c. Pemutihan IMB	0.00	1,596,500.00	0.00	1,596,500.00	#DIV/0!	1,596,500.00
	4 1 2 3	d. Administrasi Pemutihan IMB	10,000,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.10	9,990,000.00
	4 1 2 3	e. Admi/Bea Balik Nama IMB	0.00	27,416,400.00	583,600.00	28,000,000.00	#DIV/0!	28,000,000.00
	4 1 4 08 03	f. Denda Retribusi	1,250,000,000.00	4,041,450,211.00	242,872,470.07	4,284,322,681.07	342.75	3,034,322,681.0
		- IMB	1,250,000,000.00	102,407,335.00	3,282,531.00	105,689,866.00	8.46	(1,144,310,134.0
		- RTBL	0.00	3,545,789,002.00	173,154,800.00	3,718,943,802.00	#DIV/0!	3,718,943,802.0
		- Site plan (Ijin Makam dll)	0.00	393,253,874.00	66,435,139.07	459,689,013.07	#DIV/0!	459,689,013.0
	4 1 2 03	5. IMB Reklame	100,000,000.00	89,049,525.00	52,660,050.00	141,709,575.00	141.71	41,709,575.00
	4 1 2 03 13	6. IMB Menara Telekomunikasi/Tower/Denda Tower	3,000,000,000.00	1,281,890,000.00	0.00	1,281,890,000.00	42.73	(1,718,110,000.0
	4 1 2 03	7. IMB Kabel Tanam	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 2 02 12	8. Pengolahan limbah cair	0.00	26,927,140.00	2,220,250.00	29,147,390.00	#DIV/0!	29,147,390.00
		Jumlah 9A	10,686,120,640.00	18,873,591,684.00	1,621,912,469.07	20,495,504,153.07	191.80	9,809,383,513.0
B		LAIN-LAIN PAD						
	4 1 4 01	1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan	28,434,000.00	16,156,000.00	0.00	16,156,000.00	56.82	(12,278,000.00
	4 1 4 01 07	a. Penjualan drum bekas aspal	28,434,000.00	16,156,000.00	0.00	16,156,000.00	56.82	(12,278,000.00
		Jumlah 9B	28,434,000.00	16,156,000.00	0.00	16,156,000.00	56.82	(12,278,000.00
		Jumlah 9	10,714,554,640.00	18,889,747,684.00	1,621,912,469.07	20,511,660,153.07	191.44	9,797,105,513.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	1 07	1 07 01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
			Retribusi Daerah						
	4 1	2 01 05	1. Pelayanan Parkir	400,000,000.00	398,210,750.00	33,194,250.00	431,405,000.00	107.85	31,405,000
	4 1	2 01 07	2. Pengujian Kendaraan Bermotor	1,000,000,000.00	1,085,615,000.00	102,869,500.00	1,188,484,500.00	118.85	188,484,500
	4 1	2 02 04	3. Terminal	352,511,000.00	351,084,300.00	51,712,500.00	402,796,800.00	114.27	50,285,800
			a. Terminal	312,675,000.00	319,157,500.00	45,728,500.00	364,886,000.00	116.70	52,211,000
			b. MCK Terminal	20,031,000.00	16,164,000.00	3,642,000.00	19,806,000.00	98.88	(275,000)
			c. Locket terminal Jombor	8,085,000.00	6,862,800.00	1,470,000.00	8,332,800.00	103.06	247,800
			d. PKL	11,720,000.00	8,900,000.00	872,000.00	9,772,000.00	83.38	(1,948,000)
	4 1	2 03 04	4. Ijin Trayek	1,140,000.00	1,720,000.00	30,000.00	1,750,000.00	153.51	610,000
	4 1	2 3 04	a. Ijin Trayek	950,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	160.00	570,000
	4 1	2 3 04	b. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	190,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00	121.05	40,000
			Jumlah 10	1,753,651,000.00	1,836,630,050.00	187,806,250.00	2,024,436,300.00	115.44	270,785,300
11	2 04	1 17 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
			RETRIBUSI						
	4 1	2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	51,969,200.00	27,609,020.00	2,636,240.00	30,245,260.00	58.20	(21,723,940)
	4 1	2 02 01	a. Fasilitas Kaliurang	16,670,000.00	9,532,200.00	801,200.00	10,333,400.00	61.99	(6,336,600)
	4 1	2 02 01	b. Fasilitas Kaliadem	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	4 1	2 02 01	c. Fasilitas Tlogoputri/Kios Kaliurang	35,299,200.00	18,076,820.00	1,835,040.00	19,911,860.00	56.41	(15,387,340)
	4 1	2 02 10	2. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	482,587,290.00	779,636,430.00	104,665,985.00	884,302,415.00	183.24	401,715,120
			a. Candi	8,287,290.00	15,513,000.00	2,220,000.00	17,733,000.00	213.98	9,445,710
			b. Menara Pandang	16,800,000.00	17,534,500.00	957,000.00	18,491,500.00	110.07	1,691,500
			c. Wahana/Museum Gunung Merapi	390,000,000.00	257,722,000.00	40,851,000.00	298,573,000.00	76.56	(91,427,000)
			d. Tiket Sinema/Mini Theater	0.00	286,790,000.00	48,905,000.00	335,695,000.00	#DIV/0!	335,695,000
	4 1	4	e. TWC Ratu Boko	67,500,000.00	202,076,930.00	11,732,985.00	213,809,915.00	316.76	146,309,915
	4 1	4	LAIN-LAIN PAD	0.00	7,137,900.00	2,846,400.00	9,984,300.00	#DIV/0!	9,984,300
	4 1	4	- Bagi Hasil Parkir Museum Gunung Merapi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
			Jumlah 11	534,556,490.00	814,383,350.00	110,148,625.00	924,531,975.00	172.95	389,975,480
12	1 16	1 16 01	KANTOR PJM						
			*) Lain-lain PAD Sebelum BLUD						
	4 1	4 14 02	1 - Kontribusi KPZKS	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1	4 14 02	- Kontribusi Aman	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	#DIV/0!	61,000,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Mekar	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1	4 14 11	- Kontribusi dari Nakersos/Lulusan Pelatihan	0.00	13,310,550.00	0.00	13,310,550.00	#DIV/0!	13,310,550
	4 1	4 14 11	- Kontribusi dari Pariwisata	0.00	26,075,000.00	0.00	26,075,000.00	#DIV/0!	26,075,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi dari Pasar	0.00	4,412,500.00	0.00	4,412,500.00	#DIV/0!	4,412,500
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal USEP	0.00	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	#DIV/0!	3,095,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	0.00	29,024,000.00	0.00	29,024,000.00	#DIV/0!	29,024,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal TPH LUEP	0.00	8,825,000.00	0.00	8,825,000.00	#DIV/0!	8,825,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal Pertanian	0.00	62,635,000.00	0.00	62,635,000.00	#DIV/0!	62,635,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal Koperasi & UKM	0.00	138,325,000.00	0.00	138,325,000.00	#DIV/0!	138,325,000
	4 1	4 14 11	- Kontribusi Penguatan dari Perindustrian	0.00	19,745,000.00	0.00	19,745,000.00	#DIV/0!	19,745,000
	4 1	4	2 Denda Angsuran	0.00	216,125.00	0.00	216,125.00	#DIV/0!	216,125
	4 1	4	3 Jasa Giro Penguatan Modal	0.00	84,145,822.00	0.00	84,145,822.00	#DIV/0!	84,145,822
			Jumlah 12	0.00	450,808,997.00	0.00	450,808,997.00	#DIV/0!	(450,808,997)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		*j) Lain-lain PAD setelah BLUD									
4	1	4	14	02	1 - Kontribusi KP2KS	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	100.00	
4	1	4	14	02	- Kontribusi Aman	183,000,000.00	122,000,000.00	15,250,000.00	137,250,000.00	75.00	(45,750,000.00)
4	1	4	14	11	- Kontribusi Mekar	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00	
4	1	4	14	11	- Kontribusi dari Nakersos/Lulusan Pelatihan	6,615,000.00	5,995,000.00	860,000.00	6,855,000.00	103.63	240.00
4	1	4	14	11	- Kontribusi dari Pariwisata	81,225,000.00	66,300,000.00	5,625,000.00	71,925,000.00	88.55	(9,300,000.00)
4	1	4	14	11	- Kontribusi dari Pasar	13,117,500.00	12,232,000.00	1,585,000.00	14,817,000.00	112.96	1,699,500.00
4	1	4	14	11	- Kontribusi Penguatan Modal USEP	8,925,000.00	12,390,000.00	1,805,000.00	14,195,000.00	159.05	5,270,000.00
4	1	4	14	11	- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	114,262,500.00	103,479,000.00	10,875,000.00	114,354,000.00	100.08	91,500.00
4	1	4	14	11	- Kontribusi Penguatan Modal TPH LUEP	239,062,500.00	282,800,000.00	46,237,500.00	329,037,500.00	137.64	89,975,000.00
4	1	4	14	11	- Kontribusi Penguatan Modal Koperasi & UKM	349,134,270.00	286,650,700.00	35,860,000.00	322,510,700.00	92.37	(26,623,570.00)
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Perikanan	79,680,000.00	63,950,000.00	9,545,000.00	73,495,000.00	92.24	(6,185,000.00)
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Perikanan	100,331,250.00	128,650,000.00	2,300,000.00	128,950,000.00	128.52	28,618,750.00
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Peternakan	343,297,500.00	319,610,000.00	128,750,000.00	448,360,000.00	130.60	105,062,500.00
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Kehutanan	9,750,000.00	12,100,000.00	0.00	12,100,000.00	124.10	2,350,000.00
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Perkebunan	20,197,500.00	17,350,000.00	3,400,000.00	20,750,000.00	102.74	552,500.00
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Ketenagakerjaan	12,637,500.00	5,900,000.00	1,000,000.00	6,900,000.00	54.60	(5,737,500.00)
4	1	4			- Kontribusi Penguatan dari Keluarga terPHK	25,326,563.00	26,450,000.00	1,782,000.00	28,232,000.00	111.47	2,905,437.00
4	1	4			2 Denda Angsuran	0.00	501,180.00		501,180.00		712,930.00
4	1	4			3 Jasa Giro Penguatan Modal	0.00	211,782,849.00	26,874,742.00	238,657,591.00		238,657,591.00
					Jumlah 12	1,694,062,003.00	1,784,640,729.00	291,960,992.00	2,076,601,721.00	122.58	(382,539,633.00)
13	1	14	1	14	01	DINAS NAKERSOS					
						RETRIBUSI					
4	1	3	01	10	- Retribusi Pelayanan Pendidikan/Pelatihan Kerja Swadana	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
						LAIN-LAIN PAD					
4	1	4			- Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan & Pelatihan	36,000,000.00	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	16.24	(15,300,000.00)
4	1	4	14	09	- Kontribusi Penguatan Modal keluarga terPHK	11,200,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	9.07	(8,400,000.00)
4	1	4	14	08	- Kontribusi Penguatan Modal TnI/Ketenagakerjaan	10,000,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	16.00	(8,400,000.00)
4	1	4	14	10	- Kontribusi Penguatan Modal USEP	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
					Jumlah 13	57,350,000.00	9,314,000.00	0.00	9,314,000.00	16.24	(48,036,000.00)
14	1	12	1	12	01	BADAN KB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
						LAIN-LAIN PAD					
4	1	3	14	11	- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	1,762,500.00	450,000.00	0.00	450,000.00	25.53	(1,312,500.00)
					Jumlah 14	1,762,500.00	450,000.00	0.00	450,000.00	25.53	(1,312,500.00)
8	1	20	1	20	09	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN					
4	1	2	03	03	- Retribusi Ijin Gangguan	1,200,000,000.00	1,700,664,674.40	132,882,595.60	1,833,547,270.00	152.80	633,547,270.00
					Jumlah 8	1,200,000,000.00	1,700,664,674.40	132,882,595.60	1,833,547,270.00	152.80	633,547,270.00
					*j) di Rekening Kasda						
15	2	06	1	15	01	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI					
						A Lain-lain PAD					
4	1	3	14		- Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	39,589,330.00	16,721,500.00	0.00	16,721,500.00	42.24	(22,867,830.00)
4	1	3	14	01	a. Kontribusi Masy. dari Penguatan Modal Perindustrian	24,769,000.00	5,115,000.00	0.00	5,115,000.00	20.65	(19,654,000.00)
4	1	3	14	02	b. Kontribusi Masy. dari Penguatan Modal Koperasi	14,820,330.00	11,606,500.00	0.00	11,606,500.00	78.31	(3,213,830.00)
					Jumlah 15	39,589,330.00	16,721,500.00	0.00	16,721,500.00	42.24	(22,867,830.00)
					*j) Sejumlah Rp. 37.490.700,00 diikuti di SKPD sbb : Dinsakersos Rp. 10.470.000, Disperindagkop Rp. 10.510.700 dan Dispertahut Rp. 16.510.000						

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	1 10 1 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL						
	4 1 2 01 03	1. Retribusi Penggantian Biaya cetak KTP	1,451,050,000.00	1,153,250,000.00	49,597,000.00	1,202,847,000.00	82.89	(248,203,000)
	4 1 2 01 03	2. Retribusi Penggantian Biaya Akta catatan sipil	66,875,000.00	68,255,000.00	11,215,000.00	79,470,000.00	118.83	12,595,000
		Lain-lain PAD						
	4 1 4	Lain-lain/Sanksi Administrasi	400,750,000.00	206,275,000.00	18,940,000.00	225,215,000.00	56.20	(175,535,000)
		Jumlah 16	1,918,675,000.00	1,427,780,000.00	79,752,000.00	1,507,532,000.00	78.57	(411,143,000)
17	2 01 1 21 01	DINAS PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN						
	A	RETRIBUSI						
	4 1 2 01 06	1. UPTD Pasar Hewan Gamping	212,850,000.00	213,183,500.00	15,105,000.00	228,288,500.00	107.25	15,438,500
	4 1 2 02 08	2. Rumah Potong Hewan	42,075,000.00	67,320,500.00	6,038,000.00	73,358,500.00	174.35	31,283,500
	4 1 2 02 13	3. Penjualan Produksi Usaha Daerah	203,700,000.00	120,545,000.00	54,127,500.00	174,672,500.00	85.75	(29,027,500)
	4 1 2 2 13	a. Penjualan Benih Ikan	75,000,000.00	51,687,000.00	32,252,500.00	83,939,500.00	111.92	8,939,500
	4 1 2 2 13	b. Penjualan Hasil Tanaman BPP	125,700,000.00	66,958,000.00	21,875,000.00	88,833,000.00	70.67	(36,867,000)
	4 1 2 2 13	c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3,000,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	63.33	(1,100,000)
		Jumlah 17 A	458,625,000.00	401,049,000.00	75,270,500.00	476,319,500.00	103.86	17,694,500
	B	LAIN-LAIN PAD						
	4 1 4 14	1. Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000)
	4 1 4 14 03	a. Penanakan	3,000,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	2.33	(2,930,000)
	4 1 4 14 04	b. Tanaman Pangan & Hortikultura,	20,100,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	21.14	(15,850,000)
	4 1 4 14 05	c. Perkebunan	2,070,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	36.23	(1,320,000)
	4 1 4 14 06	d. Peternakan	105,000,000.00	3,525,000.00	0.00	3,525,000.00	3.36	(101,475,000)
	4 1 4 14 07	e. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0
		f. LUEP/Ketahanan Pangan & Penyuluhan	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	#DIV/0!	3,150,000
		g. Lain-lain	0.00	49,625,000.00	8,500,000.00	58,125,000.00	#DIV/0!	58,125,000
		Jumlah 17 B	130,170,000.00	61,370,000.00	8,500,000.00	69,870,000.00	53.68	(60,300,000)
		Jumlah 17	588,795,000.00	462,419,000.00	83,770,500.00	546,189,500.00	92.76	(42,605,500)
		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	241,003,081,720.31	262,319,779,792.66	38,749,759,491.47	301,069,539,284.13	124.92	60,066,457,563
REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN								
	4 1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150
	4 1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	22,241,060,530.00	31,233,892,968.79	2,801,076,818.49	34,034,969,787.28	153.03	11,793,909,257
	4 1 3	PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	11,713,222,161.31	12,783,121,935.56	0.00	12,783,121,935.56	109.13	1,069,899,774
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD	58,698,799,029.00	61,946,091,424.61	14,469,485,986.21	76,415,577,410.82	130.18	17,716,778,381
		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	241,003,081,720.31	262,319,779,792.66	38,749,759,491.47	301,069,539,284.13	124.92	60,066,457,563

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Kepala Daerah Kabupaten Karangasem, Keuangan dan Aset Daerah

